

**EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN LANGSUNG
SEMENTARA MASYARAKAT DI YOGYAKARTA :
Studi di Kelurahan Hargobinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten
Sleman, DIY**



Disusun oleh:

Fikriyah Asmawati, S.Ikom
NIM 1220010035

TESIS

Diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh
Gelar Magister dalam Pekerjaan Sosial
Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi Pekerjaan Sosial

**YOGYAKARTA
2014**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang Bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Fikriyah Asmawati, S.Ikom
- Nomor Induk : 1220010035
Jenjang : Strata 2 (S2)
Program Studi : *Intredisciplinary Islamic Studies*
Konsentrasi : Pekerjaan Sosial

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam tesis ini saya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan tesis saya ini adalah asli hasil karya / penelitian sendiri dan bukan plagiasi dari karya / penelitian orang lain.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya agar dapat diketahui oleh anggota dewan penguji.

Yogyakarta, 14 Oktober 2014

Yang Menyatakan,



Fikriyah Asmawati, S.Ikom
NIM 1220010035



KEMENTERIAN AGAMA
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PENGESAHAN

Tesis berjudul : EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN LANGSUNG
- SEMENTARA MASYARAKAT DI YOGYAKARTA: Studi di
Kelurahan Hargobinangun Kecamatan Pakem Kabupaten Sleman DIY
Nama : Fikriyah Asmawati, S.IKom.
NIM : 1220011035
Prodi : *Interdisciplinary Islamic Studies*
Konsentrasi : Pekerjaan Sosial
Tanggal Ujian : 20 Oktober 2014

telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ilmu Sains

Yogyakarta, 30 Oktober 2014



Direktur,

Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A.
NIP. 19641008 199103 1 002

PERSETUJUAN TIM PENGUJI
UJIAN TESIS

Tesis Berjudul : Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat di Yogyakarta : Studi di Kelurahan Hargobinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman, DIY

Nama : Fikriyah Asmawati, S.Ikom

NIM : 1220010035

Prodi : *Intredisciplinary Islamic Studies*

Konsentrasi : Pekerjaan Sosial

Telah disetujui tim penguji ujian munaqoshah

Ketua : Ro'fah Mudzakkir, BSW., M.A., Ph.D

Sekretaris : Dr. Nurul Haq, M.Hum

Pembimbing/Penguji : Dr. Pajar Hatma Indrajaya, S.Sos., M.Si

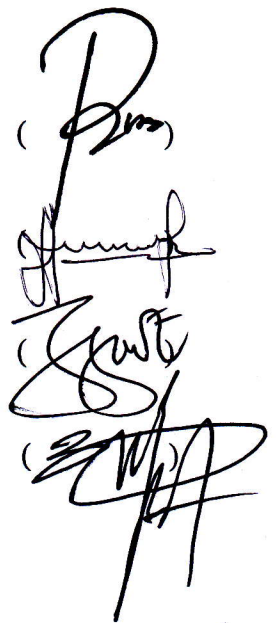
Penguji : Dr. Sriharini, M.Si

Diuji di Yogyakarta pada tanggal 20 Oktober 2014

Waktu : 13.00 WIB

Hasil/Nilai : A/91

Predikat : Cumlaude



NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada :
Yth. Direktur Program Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah melakukan bimbingan, memeriksa, mengarahkan, dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka selaku pembimbing saya menyatakan bahwa tesis saudara :

Nama : Fikriyah Asmawati, S.Ikom
NIM : 1220010035
Prodi : *Interdisciplinary Islamic Studies*
Judul Tesis : Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat di Yogyakarta : Studi di Kelurahan Hargobinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman, DIY

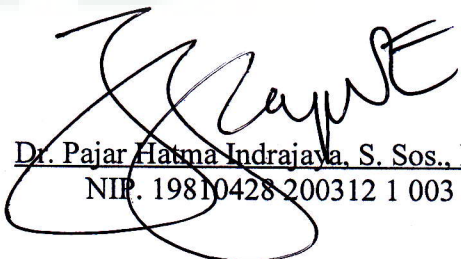
Telah dapat diajukan kepada Direktur Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar sarjana strata dua (S2) *Interdisciplinary Islamic Studies*.

Harapan saya semoga saudara tersebut segera dipanggil untuk mempertanggungjawabkan tesisnya dalam sidang munaqosyah.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 14 Oktober 2014
Pembimbing,



Dr. Pajar Hatma Indrajaya, S. Sos., M.Si
NIP. 19810428 200312 1 003

ABSTRAKSI

BLSM adalah jenis biaya perlindungan sosial dengan sistem *cash transfer* yang disediakan pemerintah sebagai kompensasi atas kenaikan harga Bahan bakar Minyak (BBM) untuk membantu meringankan beban masyarakat miskin April 2013 Lalu. Cara ini dianggap pemerintah ampuh untuk meringankan kebutuhan masyarakat sehari-hari. Namun, dalam pelaksanaan program ini tidak ditemukan adanya acuan atau pedoman khusus yang berisi penjelasan menyeluruh tentang program BLSM bagi semua pihak yang berkepentingan. Acuan yang tersedia hanya berupa buku petunjuk parsial seperti petunjuk pendataan rumah tangga miskin, Panduan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) petunjuk pendistribusian Kartu Perlindungan Sosial (KPS) yang persebarannya cenderung terbatas di kalangan internal BPS (Badan Pusat Statistik).

Kenaikan harga BBM (bahan bakar minyak) pada 22 April 2013 merupakan salah satu elemen dasar penyebab meningkatnya kemiskinan di Indonesia. Bahan bakar yang melambung tinggi tidak sejalan dengan ekspektasi masyarakat terhadap jual beli. Sejatinya pemerintah menetapkan kenaikan harga bahan bakar minyak dalam rangka mengurangi beban subsidi negara. Namun demikian kenaikan tersebut juga berpengaruh pada tingkat jual beli masyarakat. Harga yang melambung tinggi akibat kenaikan ongkos transportasi membuat masyarakat cenderung melemah dalam konsumsi kebutuhan. Hal tersebutlah yang mengilhami penelitian ini dilaksanakan yakni untuk menyibak tabir apakah pelaksanaan Program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) bagi rumah tangga miskin di kelurahan Hargobinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman Yogyakarta sudah sesuai dengan sasaran yang dituju, serta bagaimanakah pengaruh dan Efektifitasnya?

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Subyek penelitian adalah sumber-sumber yang memungkinkan untuk memperoleh keterangan penelitian atau data. Subyek dalam penelitian ini dibagi menjadi dua cluster; **pertama**: cluster Pengelola Program yang terdiri dari 5 informan, dan **kedua**: cluster Penerima Manfaat Program yakni terdiri dari 30 informan. Tujuan dari penelitian ini dimaksudkan untuk salah satu acuan dalam mengambil kebijakan yang lebih relevan dengan cakupan yang lebih komprehensif dan representative.

Hasil dari penelitian ini diperoleh sebuah kesimpulan bahwa Bantuan BLSM dalam prakeknya sudah berjalan sesuai sasaran yang dituju, program ini juga cukup berpengaruh positif untuk mempertahankan daya beli masyarakat miskin terhadap barang dan jasa ketika kenaikan BBM 2013 silam di Hargobinangun, namun, jika ditelaah dari segi efektifitas, program BLSM jelas masih jauh dari kata efektif apalagi efisien dalam memenuhi kebutuhan Rumah Tangga Miskin akibat kenaikan harga BBM.

Kata Kunci : Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM), Kemiskinan, Evaluasi Program.

ABSTRACTIONS

BLSM is a type of social protection costs by a system of cash transfers provided by the government as compensation for the rise in the price of fuel oil (BBM) to help ease the burden on the poor April 2013 So. This method is considered a powerful government to alleviate the needs of everyday people. However, in the implementation of this program, there are no specific guidelines or a reference that contains comprehensive explanations about BLSM program for all interested parties. Reference is available only as a partial guide data on the poor instructions, the District Social Welfare Workers Guide (TKSK) distribution instructions Card Social Protection (KPS) which tend to be limited in its range of internal circles BPS (Central Bureau of Statistics).

Price increases in fuel (fuel oil) on 22 April 2013 is one of the basic elements of the causes of increasing poverty in Indonesia. High bounch of fuel oil not in line with society's expectations of buying and selling. Indeed the government set the price hike of fuel oil in order to reduce the burden on state subsidies. However, this increase also affects the level of buying and selling public. The rising prices due to higher transportation costs makes people tend to weaken the consumption needs. This is exactly what inspired the research was conducted to uncover the veil of the implementation of the Direct Aid Program Is While Society (BLSM) for poor households in villages Hargobinangun, Pakem District, Sleman District, Yogyakarta is in conformity with the intended target, and how do they influence and Effectiveness?

Type of research is a field (Field Research), while the method used in this research is descriptive qualitative method. Subjects were allowed sources to obtain information or research data. The subjects in this study were divided into two clusters; first: Program Manager cluster consisting of 5 informants, and second: the Program Beneficiaries cluster consists of 30 informants. The purpose of this study is intended to provide guidelines for a policy that is more relevant to the coverage is more comprehensive and representative.

The results of this study obtained a conclusion that the BLSM assist in practice is going according to the intended target, the program is also quite a positive effect to maintain the purchasing power of the poor to goods and services when the rise in fuel prices earlier in Hargobinangun 2013, however, when analyzed in terms of effectiveness, BLSM program clearly is far from effective especially efficient in meeting the needs of poor households due to rising fuel prices.

Keywords: Direct Aid Society While (BLSM), Poverty, Program Evaluation

MOTTO

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”.

(QS Alam Nasyrah: 6)

“... Berfikir Politis... Berjiwa Humanis... Ber-Akhlak Islamis...”

Fikriyah Asmawati

“Kalau engkau tak mampu menjadi beringin yang tegak dipuncak bukit...

Jadilah belukar, tetapi belukar yang baik yang tumbuh ditepi danau...

Kalau engkau tak mampu menjadi belukar...

Jadilah saja rumput....

Tetapi rumput yang memperkuat tanggul pinggir jalan...

Kalau engkau tak mampu menjadi jalan raya...

Jadilah saja jalan setapak yang membawa orang ke mata air...

Tidaklah semua menjadi kapten...

Mesti ada awak kapalnya...

Bukan besar kecilnya tugas yang menjadikan tinggi rendahnya nilai

dirimu...

Jadilah saja dirimu...sebaik baik dirimu...”

Douglas Malloch

HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Tesis ini saya persembahkan kepada
Seluruh Pejuang Kesejahteraan Sosial
Khususnya RJS dan RJSN penerima BLSN 2013 yang
Telah Banyak memberi Ilmu walau hanya sekali kita bertemu...*

Serta...

*Almamater kebanggaan, Program Pekerjaan Sosial
serta
Keluarga Besar Pascasarjana Interdisciplinary Islamic Studies
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*

KATA PENGANTAR



أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ . أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ .
أَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ أَمَا بَعْدُ :

Segala puji dan syukur peneliti panjatkan bagi Allah SWT karena telah melimpahkan hidayah, inayah dan rahmat-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan tesis ini. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang mengabdikan dirinya sebagai petunjuk untuk kehidupan yang lebih baik dan telah membuka menuju *Dinul Islam*.

Atas keridhoan-Nya, peneliti menyusun tesis yang berjudul **”Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat di Yogyakarta: Studi di Kelurahan Hargobinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman, DIY.”** Peneliti menyadari bahwa penyusunan tesis ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, baik secara moril maupun materiil sehingga peneliti dapat menghadapi berbagai permasalahan dengan baik dan lancar.

Untuk itu dengan segala kerendahan hati peneliti mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Ro’fah Mudzakkir, BSW., M.A., Ph.D., Bapak Dr. Nurul Haq, M.Hum., selaku Ketua dan Sekretaris Prodi *Interdisciplinary Islamic Studies* Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Pajar Hatma Indrajaya, S.Sos., M.Si, serta Ibu Dr. Sriharini, M.Si, selaku dosen pembimbing dan Dosen Penguji tesis yang telah sangat sabar memberikan bimbingan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada peneliti.
3. Seluruh Dosen Prodi *Interdisciplinary Islamic Studies* terkhusus Bapak. Sujatno Pertomo selaku Staff terbaik yang selalu sabar melayani kebawelan Peneliti

selama kuliah di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Kepala Kelurahan Hargobinangun yang telah memberikan izin melakukan penelitian tesis di area kekuasaannya.
5. Seluruh Rekan dan Rekanita “Ikatan Pelajar Putri Nahdhatul Ulama” khususnya pengurus PW. IPPNU DIY yang telah memberi dukungan dan semangat dalam pengerjaan tesis ini.
6. Ayahanda tercinta alm. H. As’ad Hasbullah (do’a teriring selalu), ibunda tercinta Hj. Maulah serta kakak-kakakku terkasih H. M. Saifullah Lc, M.Pdi, Shuhbatun Majjedah, Izzatul Islamiyah SE.I, Ilmi Zadah, SH.I, Bunga Desiani, Ahmad Syamwiel. Dysag Ahmad Tsarwan dan Amelia Dian Rosyidah dua ponakan Unyu-unyuku yang selalu mensuplai do’a & semangat serta perhatian setiap waktu.
7. Dan Yang terakhir kepada teman, sahabat sekaligus calon Imam masa depanku Rheza Wahyu Anjaya, S.IP terima kasih yang tak terhingga atas segala support dan dukungan yang tak terhingga selama ini, hanya do’a terindah yang mampu aku panjatkan untuk membalas segala kebaikan budimu, semoga Allah meningkatkan derajatmu.

Peneliti menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna oleh karena itu peneliti mengharapkan saran yang bersifat membangun sebagai penyempurnaan dan semoga segala bantuan jasa yang telah diberikan kepada peneliti dapat menjadi amal ibadah serta mendapatkan balasan dari Allah SWT. *Amien Ya Rabbal ’alamien.*

Yogyakarta, 3 Oktober 2014

Peneliti

Fikriyah Asmawati, S.Ikom
NIM 1220010035

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iv
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING	v
ABSTRACTIONS.....	vi
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR SINGKATAN	xvii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
1. Tujuan Penelitian	11
2. Manfaat Penelitian	11
D. Kajian Pustaka	12
E. Kerangka Teori	15
F. Metode Penelitian	38
G. Teknik Analisis Data	44
H. Uji Validitas Data	45
I. Sistematika dan Pembahasan	45

BAB II GAMBARAN UMUM KELURAHAN HARGOBINANGUN PAKEM YOGYAKARTA

A. Gambaran Lokasi	47
B. Keadaan Demografis	49

C. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat	55
D. Keadaan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Hargobinangun	61
E. Pembangunan Sektor Pariwisata	63
F. Keadaan Penduduk Miskin di Kelurahan Hargobinangun	64
G. Data Penduduk yang Mendapatkan BLSM tahun	65

BAB III PELAKSANAAN PROGRAM BLSM

A. Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat....	67
1. Bantuan Langsung Sementara Masyarakat di Kabupaten Sleman	68
2. Organisasi Pelaksana	69
3. Pendataan Rumah Tangga Miskin	70
4. Sosialisasi Program BLSM.....	72
5. Penyerahan Kartu Perlindungan Sosial (KPS).....	73
6. Mekanisme Pemutakhiran Penerima KPS.....	77
7. Pencairan Dana BLSM.....	79
8. Penanganan Pengaduan	81
B. Evaluasi Pelaksanaan Program BLSM	87
1. Segi Efektifitas	87
2. Segi Efisiensi	92
3. Segi Kecukupan	94
4. Segi Pemerataan	97
5. Segi Responsifitas	100
6. Segi Ketepatan	104

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan & Kritik.....	109
B. Saran	114
C. Penutup	117

DAFTAR PUSTAKA	118
-----------------------------	------------

LAMPIRAN.....	122
----------------------	------------

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Tabel Indikator-indikator Evaluasi	28
Tabel 2 : Kriteria Rumah Tangga Miskin Menurut Badan Pusat Statistik	36
Tabel 3 : Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin	50
Tabel 4 : Jumlah Penduduk Menurut Usia.....	51
Tabel 5 : Jumlah Penduduk Menurut Usia Berdasarkan Kelompok Tenaga Kerja .	52
Tabel 6 : Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Berdasarkan Lulusan Pendidikan Umum.....	53
Tabel 7 : Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Berdasarkan Lulusan Pendidikan Khusus.....	54
Tabel 8 : Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencarian	55
Tabel 9 : Jumlah pembangunan bidang industry.....	58
Tabel 10 : Jumlah Penduduk menurut Agama/Penghayat	59
Tabel 11 : Jumlah Pembangunan Sektor Pariwisata	63
Tabel 12 : Jumlah kepala keluarga penduduk miskin/Keluarga miskin	64
Tabel 13 : Jumlah Penduduk Miskin yang memperoleh BLSM	65
Tabel 14 : Jumlah Anggaran Program BLSM.....	68
Tabel 15 : Posko Pengaduan di Tingkat Desa/Kelurahan dan Kecamatan	85
Tabel 16 : Jawaban Informan Berdasarkan Pertanyaan: Apakah dengan pemberian BLSM dapat melindungi keluarga miskin dari dampak langsung kenaikan BBM?.....	87
Tabel 17 : Jawaban Informan Berdasarkan Pertanyaan: Apakah dengan Pemberian BLSM dapat Mempertahankan Kemampuan Daya Beli Keluarga Akibat Terjadinya Kenaikan BBM?.....	89

Tabel 18 : Jawaban Informan Berdasarkan Pertanyaan: Apakah Anda Puas Mendapatkan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat Walaupun Harga BBM Naik?.....	90
Tabel 19 : Simulasi Estimasi Tingkat Kemiskinan Nasional Akibat Kenaikan Harga BBM dan Pemberian BLSM kepada Rumah Tangga Miskin & Rumah Tangga Sasaran.....	93
Tabel 20 : Jawaban Informan Berdasarkan Pertanyaan: Apakah Pemberian BLSM Sebesar Rp. 150.000,-/bulan sudah mencukupi untuk Menambah Pemasukan Keluarga Seiring dengan Terjadinya Kenaikan Harga BBM?	95
Tabel 21 : Jawaban Informan Berdasarkan Pertanyaan: Apakah Terjadi Pemerataan dalam Pemberian BLSM dalam Hal Semua Rumah Tangga Miskin yang ada Telah Menerima BLSM?	98
Tabel 22 : Jawaban Informan Berdasarkan Pertanyaan: Apakah dengan Pemberian BLSM dapat membebaskan Keluarga dari Persoalan Kemiskinan?	101
Tabel 23 : Jawaban Informan Berdasarkan Pertanyaan: Apakah BLSM Telah Membantu Perekonomian Keluarga?.....	105
Tabel 24 : Jawaban Informan Berdasarkan Pertanyaan: Apakah Lebih Baik Kompensasi Pengurangan Subsidi BBM diberikan oleh Pemerintah dalam Bentuk Bantuan Langsung Sementara Masyarakat?	106

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Peta Wilayah Hargobinangun	48
Gambar 2 : Tampilan Kartu Perlindungan Sosial	76
Gambar 3 : Mekanisme Penyaluran BLSM	81
Gambar 4 : Tampilan Depan Portal LAPOR!	84
Gambar 5 : Lampiran Gambar Rumah RTS Cluster Rentan Miskin	122
Gambar 6 : Lampiran Gambar Rumah RTS Cluster Miskin.....	123
Gambar 7 : Lampiran Gambar Rumah RTS Cluster Fakir Miskin	124

DAFTAR SINGKATAN

BAPPENAS	: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BBM	: Bahan Bakar Minyak
BKKBN	: Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional
BPKP	: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
BPM	: Badan Pemberdayaan Masyarakat
BPS	: Badan Pusat Statistik
BSM	: Bantuan Siswa Miskin
CCT	: Conditional Cash Transfer
RTS	: Rumah Tangga Sasaran
RTS PM	: Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat
KESMAS	: Kesejahteraan Masyarakat
KK	: Kepala Keluarga
KPS	: Kartu Perlindungan Sosial
LAPOR	: Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat
MUSDES	: Musyawarah daerah
MUSKEL	: Musyawarah Kelurahan
PMKS	: Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
PSKS	: Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial
PKK	: Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
PKPS	: Program Kompensasi Pengurangan Subsidi
PPPPS (P4S)	: Program Percepatan dan Perluasan Perlindungan Sosial
PPLS	: Pendataan Program Perlindungan Sosial
PSE05/13	: Pendataan Sosial Ekonomi Penduduk 2005/2013
SKRTM	: Surat Keterangan Rumah Tangga Miskin
TNP2K	: Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
TKSK	: Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang masalah

Kemiskinan merupakan masalah utama pembangunan yang sifatnya kompleks dan multi dimensional. Persoalan kemiskinan bukan hanya berdimensi ekonomi tetapi juga sosial budaya, politik bahkan ideologi. Secara umum kondisi kemiskinan ditandai oleh kerentanan, ketidakberdayaan, keterisolasian, dan ketidakmampuan untuk menyampaikan aspirasi dan kebutuhannya. Oleh karena sifat kemiskinan yang multi dimensi tersebut maka kemiskinan telah memberi akibat yang juga beragam, mulai dari: (a) secara sosial ekonomi dapat menjadi beban masyarakat, (b) rendahnya kualitas dan produktivitas masyarakat, (c) rendahnya partisipasi masyarakat, (d) menurunnya keterlibatan umum dan ketentraman masyarakat, (e) menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan (f) kemungkinan merosotnya mutu generasi yang akan datang. Semua indikasi tersebut merupakan kondisi yang saling terkait dan saling mempengaruhi satu sama lain.¹

Pada Tanggal 22 April 2013, pemerintah menetapkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dalam rangka mengurangi beban subsidi negara. Tingkat kenaikan harga BBM pada waktu itu tergolong tinggi dibanding kenaikan-kenaikan harga sebelumnya, yakni bensin naik 44,4% dan solar

¹ Tjahya Supriana, Birokrasi. "*Pemberdayaan dan Pengentasan Kemiskinan*". (Bandung: Humaniora Utama Press. 2000), hlm. 36.

24,4%.² Keputusan tersebut diambil dengan latar belakang: 1) peningkatan harga BBM yang sangat tinggi di pasar dunia sehingga berakibat pada makin besarnya penyediaan dana subsidi yang dengan sendirinya makin membebani anggaran belanja negara; 2) pemberian subsidi selama ini cenderung lebih banyak dinikmati kelompok masyarakat menengah ke atas, yakni pada kisaran kurang lebih 70%; dan 3) perbedaan harga yang besar antara dalam dan luar negeri memicu terjadinya penyelundupan BBM ke luar negeri.³

Kenaikan harga BBM menambah beban hidup masyarakat. Pasalnya mereka tidak hanya menghadapi kenaikan harga BBM saja, tetapi juga kenaikan berantai berbagai harga barang dan jasa kebutuhan pokok. Berbagai kenaikan tersebut menyebabkan penurunan daya beli masyarakat akan barang dan jasa yang mereka butuhkan, terlebih rumah tangga miskin. Untuk mengurangi beban tersebut, pada tanggal 22 April 2013 Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 5 Tahun 2013 tentang *pelaksanaan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat kepada Rumah Tangga Miskin*. Melalui program yang kemudian dikenal sebagai “Bantuan Langsung Sementara Masyarakat” (BLSM) ini pemerintah menyediakan dana bantuan bagi sekitar 25% penduduk Indonesia yang meliputi 15,5 juta rumah tangga miskin atau sekitar 65,6 juta jiwa.⁴ Besarnya dana yang

² Saugi Riyandi, “Kenaikan Harga BBM 22 April 2013” dalam Merdeka.com, 21 Juni 2013. Diakses pada 13 Oktober 2013 pukul 20.00wib.

³ Gusti Grehenson, “Pemerintah, Evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan” dalam Ugm.ac.id, juni 2013, Diakses tanggal 10 Oktober 2013 Pukul 09.00wib.

⁴ “Jumlah Rumah Tangga Miskin Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) 2013” dalam www.kemensos.com. Diakses Online Tanggal 5 Oktober 2013.

diberikan adalah Rp 150.000 per keluarga perbulan yang diberikan setiap 2 bulan selama satu catur wulan (4 bulan).

BLSM adalah intervensi berjenis perlindungan sosial dengan sistem *cash transfer* yang disediakan pemerintah untuk membantu meringankan beban masyarakat miskin. Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.⁵ Cara ini dianggap pemerintah ampuh untuk meringankan kebutuhan masyarakat sehari-hari. Penyaluran tahap pertama direalisasikan pada hari sabtu, 22 Juni 2013. Pada tahap ini, pemerintah menyediakan dana sebesar Rp 4,5 triliun yang kemudian disalurkan kepada 7,75 juta kepala keluarga. Jumlah ini adalah setengah dari seluruh rumah tangga sasaran sebanyak 15,5 juta.

Dalam pelaksanaan program ini tidak ditemukan adanya acuan atau pedoman umum berisi penjelasan menyeluruh tentang program BLSM bagi semua pihak yang berkepentingan. Acuan yang tersedia hanya berupa buku petunjuk parsial seperti petunjuk pendataan rumah tangga miskin, Panduan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) petunjuk pendistribusian Kartu Perlindungan Sosial (KPS) yang persebarannya cenderung terbatas di kalangan internal BPS (Badan Pusat Statistik).

Akibatnya, terdapat perbedaan pemahaman antar pihak yang terkait dengan pelaksanaan program instansi yang berperan dalam pelaksanaan BLSM, sebut saja Departemen Sosial, BPS, Pihak TKSK dan PT. Pos Indonesia. Pemerintah Daerah (Pemda) pada awalnya tidak dilibatkan secara serius dalam

⁵ UU No 11 Tahun 2009, Undang-undang tentang Kesejahteraan Sosial Pasal 1 ayat 9.

urusan ini, namun, dengan perkembangan pelaksanaannya menengok sejarah pelaksanaan BLT (Bantuan Langsung Tunai) di tahun 2005 lalu dirasa Pemda mempunyai peran besar dalam membantu memperlancar proses pencairan dana dalam rangka meredam gejolak sosial.

Di berbagai daerah, kegiatan sosialisasi program secara formal dan menyeluruh bagi pihak terkait di luar lembaga pelaksana nyaris tidak pernah dilakukan. Sosialisasi formal hanya terbatas tentang rencana kegiatan pendataan Sosial Ekonomi Penduduk 2013 (PSE13) yang dalam prakteknya merupakan pendataan keluarga/rumah tangga miskin. Demikian juga data yang dihasilkan dalam program tersebut hampir tidak ada perbedaan yang signifikan dengan data PSE05 yang didapat dari program yang sama yang dilakukan tahun 2005 yang lalu. Sosialisasi formal untuk masyarakat luas pun tidak dilakukan. Banyak pihak mengeluhkan kurangnya sosialisasi program terkait BLSM tersebut. Sebagai contoh; kriteria penerima BLSM tidak disosialisasikan secara terbuka. Bahkan instansi pemerintah di tingkat kelurahan dan kecamatan secara resmi tidak mengetahui besarnya target dan realisasi di daerahnya.⁶

Menurut buku pelaksanaan pendataan Rumah Tangga Miskin 2013, pendataan rumah tangga miskin diselenggarakan sejak Mei hingga Juni 2013. Namun dalam praktiknya waktu pelaksanaan pendataan bervariasi. Adanya kemungkinan bahwa tidak semua prosedur pendataan tersebut diikuti secara benar, serta adanya pelanggaran lain yang mungkin terjadi yaitu: 1) Petugas BPS tidak melakukan verifikasi kasat mata secara menyeluruh melainkan hanya

⁶ Rihad Wiranto, "Arti BLSM Bagi Kaum Miskin", Jurnal Nasional Online. Dalam www.jurnalonline.com. Diakses tanggal 11 Oktober 2013 pukul 23.00wib.

beberapa keluarga rumah tangga saja; 2) petugas pencacah tidak menghubungi kepala Lingkungan untuk membuat daftar keluarga rumah tangga miskin awal dan juga pecacah meminta orang lain melakukan tugasnya; 3) pengisian formulir PSE13. RT secara langsung dari rumah ke rumah hanya melakukan terhadap sebagian rumah tangga miskin; 4) pertanyaan yang diajukan kepada keluarga/rumah tangga tidak lengkap. Kebanyakan hanya dua hingga tiga variabel pertanyaan. Seperti pekerjaan, status kepemilikan rumah, dan banyaknya anak yang sekolah.⁷

Secara umum, penerima BLSM seharusnya adalah keluarga/rumah tangga miskin. Namun, di satu sisi masih banyak berita adanya keluarga/rumah tangga yang sama miskinnya tetapi tidak mendapatkan BLSM (*undercoverage*). Di sisi lain, tak sedikit ditemukan beberapa keluarga/rumah tangga yang mampu bahkan tergolong kaya menerima BLSM (*leakage*), bukan hanya itu BLSM pun banyak dibagikan kepada masyarakat yang sudah meninggal dunia. Hal tersebut merupakan kejanggalan terbesar dalam proses pelaksanaan program BLSM.⁸

Dalam kasus lain, pada masa pencairan BLSM, sering kali terjadi antrean panjang para penerima BLSM di kantor pos. Bahkan ada di beberapa daerah terjadi tindak kekerasan seperti warga yang mengamuk dan membakar kantor, begitu hebohnya kekisruhan penyaluran BLSM ini sehingga hal tersebut mengalihkan perhatian dari upaya-upaya peningkatan pelayanan kepada

⁷ Ibid, hlm. 20-21

⁸ Sudarno Sumarto, “Program Dana Tunai Untuk Penduduk Miskin; Belajar dari Program Progresia/Oportunidades di Mexico” (Lembaga Penelitian Semeru, Jakarta. 2005), hlm. 29.

masyarakat miskin yang sebelumnya menjadi fokus dana kompensasi BBM ini. Permasalahan tersebut adalah permasalahan klasik yang berulang, bagaimana tidak di tahun 2005 silam ketika pembagian BLT dilaksanakan hal-hal tersebut merupakan bumbu yang tidak terelakkan, namun, kali ini di era BLSM terjadi kembali.⁹

Lembaga Ombudsman Daerah (LOD) DIY hingga Selasa (9/7/2013) mencatat ada 350 aduan BLSM yang disampaikan warga melalui layanan SMS Gateway khusus BLSM di nomor 08112741000. Dari total aduan tersebut, 97 aduan berasal dari Kota Yogyakarta, 70 aduan dari Sleman, 68 aduan dari Bantul, 47 aduan dari Kulonprogo, 39 dari Gunungkidul, sedangkan sisanya sebanyak 29 aduan berasal dari luar DIY. Sama halnya dengan aduan yang diterima selama dua pekan terakhir, LOD kembali mendapatkan masukan terkait alokasi BLSM yang kurang tepat sasaran, serta adanya perbedaan identitas antara Kartu Perlindungan Sosial (KPS) dengan KTP dan lain sebagainya.¹⁰

Berbagai permasalahan yang ditemukan pada saat ini adalah akumulasi dari berbagai permasalahan ekonomi yang lalu, sementara pemerintah tidak mampu mengatasinya secara tepat sehingga membawa perekonomian menjadi stagflasi. Keadaan *stagflasion* sebenarnya sudah terlihat sebagai pertanda perekonomian dalam keadaan lampu kuning. Tingkat pertumbuhan melemah

⁹ Eri Mardinal, "Kisruh Pembagian BLSM" dalam Padang Express. 27 Juli 2013. Dalam www.padangekspres.co.id, diakses pada 13 Oktober 2013 pukul 14.30wib.

¹⁰ Rahma Suci Ramadhani, "Ombudsman DIY Terima 350 aduan Penyaluran BLSM". Dalam Republika.co.id. 25 Juni 2013. diakses pada 3 Oktober 2014 pukul 10.00wib.

(*Stagnation*) sementara inflasi (*inflation*) tinggi dan pengangguran terus bertambah.¹¹

Selama tiga dekade berbagai upaya penanggulangan kemiskinan dilakukan melalui penyediaan kebutuhan dasar seperti pangan, pelayanan kesehatan dan pendidikan, perluasan kesempatan kerja, pembangunan pertanian, pemberian dana bergulir melalui sistem kredit, pembangunan prasarana dan pendampingan, penyuluhan sanitasi dan lain sebagainya. Namun, ternyata kemiskinan di Indonesia belum dapat dientaskan, persentase penduduk miskin pada tahun 2012 mencapai 11,66% dan di tahun 2013 pada bulan September tercatat 11,47% penduduk Indonesia terindikasi miskin yang jumlahnya kurang lebih 28,55 juta jiwa, angka tersebut menunjukkan angka yang masih cukup fantastis jika dibandingkan dengan negara-negara berkembang sebayanya.¹² Patut dipertanyakan kenapa angka kemiskinan di Indonesia masih sangat tinggi, selain faktor naiknya harga BBM yang berperan besar terhadap naiknya jumlah penduduk miskin sampai hampir 3 kali lipat di tahun 2013. Faktor lain yang mungkin mempengaruhi adalah serangkaian cara dan strategi penanggulangan kemiskinan yang dilakukan, lebih berorientasi material. Sehingga keberlanjutannya sangat tergantung pada ketersediaan anggaran dan komitmen pemerintah.

Tidak mungkin menciptakan sumber daya manusia yang baik jika belenggu kemiskinan masyarakat masih melekat. Ketika rakyat tidak lagi

¹¹ Nurimansyah Hasibuan, *"Pemerataan dan Pembangunan Ekonomi, Teori dan Kebijakan"* (Palembang : Unibversitas Sriwijaya. 1999), hlm. 59.

¹² "Jumlah Rumah Tangga Miskin Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) 2013" dalam www.kemensos.com. Diakses Online Tanggal 5 Oktober 2013.

mampu untuk mencukupi kebutuhan minimal akibat pendapatan *real* tidak tercukupi, maka yang terpikir oleh keluarga adalah memberdayakan mereka bekerja apa saja tanpa pernah berfikir memberdayakan mereka melalui lembaga-lembaga pendidikan formal maupun nonformal. Keluarga akan membiarkan anak-anak mereka yang masih berusia sekolah untuk menjadi pengemis, pengamen maupun penjual koran di pinggiran jalan. Sementara pemerintah sibuk menghimbau wajib belajar. Akibat buruknya adalah munculnya generasi yang mudah putus asa, generasi yang minder, berwawasan rendah dan generasi yang miskin akan semangat menghadapi tantangan.

Harapan untuk menyelesaikan berbagai masalah ekonomi masih dimungkinkan. Sepanjang pemerintah mampu menciptakan terobosan melalui berbagai kebijakan ekonomi (perbaikan pada sektor bisnis investasi dan perpajakan) dan kebijakan publik yakni (perbaikan pada bidang pelayanan keamanan dan prasarana).

Penelitian ini pada dasarnya ingin mengkaji lebih lanjut bagaimana pelaksanaan Program BLSM di Kabupaten Sleman. Apakah program tersebut sudah tepat sasaran dan tepat guna khususnya bagi RTM di Kelurahan Hargobinangun yang tepatnya ada di Kecamatan Pakem Kabupaten Sleman D.I Yogyakarta. Seperti kita ketahui bahwa Kelurahan Hargobinangun terletak di kaki Gunung Merapi, kelurahan ini masuk dalam zona merah yakni berada 5 Km dibawah kaki gunung merapi.

Pada tanggal 5 November 2010 erupsi terbesar Gunung Merapi terjadi, lebih dari 122 Jiwa menjadi korban meninggal dunia, hal tersebut

sempat meluluh lantakkan Kelurahan Hargobinangun dan Kelurahan yang ada disekitarnya, sontak erupsi tersebut menyebabkan perekonomian lumpuh total hingga kurang lebih 9 bulan lamanya. Banyak warga yang kehilangan sanak saudara, keluarga, rumah hingga berbagai jenis harta benda, masyarakat yang dahulunya merupakan saudagar kaya mendadak miskin seketika karna sawah dan ladangnya hangus tergerus lava, demikian pula para peternak kambing, maupun sapi perah atau pedaging tidak sedikit hewan peliharaan mati terbakar *wedhus gembel* serta hangus tanpa sisa. Hal itu menyebabkan lebih dari setengah warga kelurahan Hargobinangun kehilangan mata pencahariannya, dan imbasnya menyebabkan kemiskinan dimana-mana. Hal tersebut menjadi menarik untuk diteliti lebih dalam karena ketika realitas sosial ekonomi masyarakat Kelurahan Hargobinangun melemah daya beli masyarakat pun menurun, jika beban masyarakat miskin kemudian ditambah dengan realitas kenaikan harga BBM ditahun 2013 maka dapat dipastikan banyak masyarakat yang mengalami penurunan daya beli terhadap barang maupun jasa. Oleh sebab itu data real jumlah penerima Bantuan pemerintah yang dalam hal ini BLSM menjadi penting untuk dibahas dan dibandingkan dengan data kemiskinan BPS terkait RTM yang menjadi penerima program BLSM 2013, berdasarkan hal inilah penelitian ini dilakukan dalam rangka memperoleh gambaran yang sesungguhnya dan tentunya memberikan pelajaran terhadap program penanggulangan kemiskinan di tempat lainnya di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Belajar dari pengalaman di masa lalu, tentang pelaksanaan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) di tahun 2005 yang selalu menghadapi berbagai permasalahan. Oleh sebab itu diperlukan suatu pengkajian dan penelitian terhadap pelaksanaan program BLSM guna menilai/mengevaluasi mengenai pelaksanaan BLSM dan efektifitasnya terhadap keluarga miskin khususnya di Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta.

Disamping itu perlu dianalisis pula mengenai keberhasilan dari BLSM tersebut sebagai salah satu program pemerintah dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Berangkat dari hal tersebut, maka penulis merumuskan masalah yang akan dikaji melalui suatu penelitian dengan melihat persoalan pada:

1. Apakah pelaksanaan Program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) bagi rumah tangga miskin di kelurahan Hargobinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman Yogyakarta sudah sesuai dengan sasaran yang dituju?
2. Bagaimana pengaruh Program BLSM bagi rumah tangga miskin di Kelurahan Hargobinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman, DIY?
3. Bagaimanakah Efektifitas Program BLSM bagi rumah tangga Miskin di Kelurahan Hargobinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman DIY?.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

C.1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran faktual tentang pelaksanaan penyaluran dana BLSM sebagai input untuk pengambilan kebijakan selanjutnya bagi pemerintah. Selain itu, penelitian ini dapat pula dijadikan dasar untuk salah satu acuan dalam mengambil kebijakan yang lebih relevan dengan cakupan yang lebih komprehensif dan representative.

Secara spesifik penelitian ini bertujuan :

1. Mengetahui apakah mekanisme pelaksanaan program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) di kelurahan Hargobinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman, Yogyakarta sudah sesuai sasaran yang dituju.
2. Menganalisa pengaruh program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) bagi rumah tangga miskin di kelurahan Hargobinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman, Yogyakarta dalam menghadapi dampak kenaikan BBM.
3. Mengevaluasi efektifitas program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) bagi rumah tangga miskin di kelurahan Hargobinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman, Yogyakarta dalam menghadapi dampak kenaikan BBM.

C.2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut :

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat mengetahui gambaran yang cukup jelas mengenai bagaimana mekanisme pelaksanaan program Perlindungan Sosial yang baik, dalam hal ini menyangkut tentang bagaimana penyaluran program BLSM yang tepat sasaran dan tepat bagi masyarakat.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran kepada pemerintah pusat dalam hal ini sebagai pengambil kebijakan program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) yang merupakan kompensasi dari pengurangan subsidi bahan bakar minyak. Sehingga pada masa yang akan datang agar dapat merumuskan kebijakan yang lebih tepat.
3. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi khazanah keilmuan yang baru mengenai evaluasi program, dan semoga dapat melengkapi ragam penelitian yang telah dihasilkan oleh para mahasiswa sebelumnya sebagai bahan acuan untuk bacaan serta referensi yang komprehensif dari suatu karya ilmiah.

D. Kajian Pustaka

Ada beberapa literatur yang telah membahas tentang Evaluasi Program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat, antara lain sebagai berikut: *pertama*, Sudarno Sumarto & Asep Suryahadi dalam Jurnal Penelitian SMERU tentang “*Program Dana Tunai untuk Penduduk Miskin Indonesia tahun 2001: Belajar dari Program Progres/Oportunidades di Maxico.*” Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif (*explanatory research*). Tujuan dari

penelitian ini adalah untuk mengetahui dan meng-evaluasi program dana tunai bagi penduduk miskin di Indonesia di elaborasikan dengan program serupa yang ada diluar negeri dalam hal ini mengambil sampel program Progres/Oportunidades di Mexico. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik kolaborasi wawancara dan studi pustaka (*library research*) dengan menggunakan pedoman wawancara yang berisi pertanyaan terbuka dengan jenis semi berstruktur. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa program dana tunai untuk Penduduk Miskin Indonesia adalah merupakan program saduran dari Progres/Oportunidades yang ada di Mexico namun masih banyak prosedur yang tidak dijalankan sehingga dalam pelaksanaannya terjadi banyak ketimpangan.¹³

Kedua, Sutan Tolang Lubis dalam Tesis yang berjudul “*Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai di Medan Johor Kota Medan*” Jenis penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif (*explanatory research*). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan meng-evaluasi program BLT yang dilaksanakan pada tahun 2005 silam. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara mendalam (*in-depth interview*). Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa, masih banyak kekurangan dan ketidak-tepatan sasaran dari program

¹³ Sudarno Sumarto, “*Program Dana Tunai Untuk Penduduk Miskin; Belajar dari Program Progres/Oportunidades di Mexico*” (Lembaga Penelitian Semeru, Jakarta. 2005).

BLT yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka pemberian kompensasi bagi kenaikan BBM di tahun 2005.¹⁴

Ketiga, Warih Budiono Setiawan dalam tesis yang berjudul “*Evaluasi Proses Pelaksanaan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) di Kecamatan Karangmojo Kabupaten Gunungkidul*” tidak jauh dari dua penelitian sebelumnya, Jenis penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif (*explanatory research*). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan meng-evaluasi pelaksanaan program pengembangan kecamatan (PPK) di kecamatan Karangmojo Kabupaten Gunungkidul. Dengan menggunakan teknik wawancara penelitian ini memperoleh hasil, bahwa PPK yang dilaksanakan di Kecamatan Karangmojo Kabupaten Gunungkidul tersebut masih jauh dari kata sukses, atau sesuai dengan target yang diharapkan pemerintah dan masyarakat, karena terjadi berbagai macam ketimpangan karena kecurangan oknum dalam praktek pelaksanaannya, hal tersebut disebabkan salah satunya karena tidak adanya badan pengawas khusus yang ditunjuk oleh pemerintah dalam menangani PPK tersebut.¹⁵

Dari ketiga judul penelitian di atas, baik dari Sudarno Sumarto & Asep Suryahadi dalam Jurnal Penelitian SMERU tentang “*Program Dana Tunai untuk Penduduk Miskin Indonesia tahun 2001: Belajar dari Program Progresa/Oportunidades di Maxico*”, kemudian tesis oleh Sutan Tolang Lubis

¹⁴ Sutan Tolang L., “*Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai di Medan Johor Kota Medan*” (Sumatra: Universitas Sumatra Utara. 2005), hlm. 20.

¹⁵ Warih Budiono Setiawan, Tesis: “*Evaluasi Proses Pelaksanaan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) di Kecamatan Karangmojo Kabupaten Gunungkidul*” (Daerah Istimewa Yogyakarta: Universitas Gajahmada. 2010). hlm. 18.

dalam Tesis yang berjudul “*Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai di Medan Johor Kota Medan*” dan penelitian Warih Budiono Setiawan dalam tesis yang berjudul “*Evaluasi Proses Pelaksanaan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) di Kecamatan Karangmojo Kabupaten Gunungkidul*” ketiganya sama membahas tentang evaluasi program pemerintah, baik BLT maupun PPK, dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, namun perbedaan utama dengan penelitian yang dilakukan peneliti dalam tesis ini adalah terletak pada obyek penelitiannya, yakni tesis ini mengangkat evaluasi program BLSM yang merupakan kelanjutan dari BLT yang mana program tersebut hari ini sedang berjalan dan marak diperdebatkan efektifitasnya oleh banyak kalangan, penelitian ini menggunakan sampel yang lebih komprehensif yakni kelurahan tertinggal di Kecamatan Pakem Kabupaten Sleman, Yogyakarta dan menggunakan metode *in-depth* interview dalam proses memperoleh datanya.

E. Kerangka Teori

1. Konsep *Conditional Cash Transfer* dan Evaluasi

a. *Conditional Cash Transfer Program*

Program tunai bersyarat bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dengan membuat program-program kesejahteraan bersyarat pada tindakan penerima. Pemerintah hanya mentransfer uang kepada orang-orang yang memenuhi kriteria tertentu. Kriteria ini mungkin termasuk anak-anak mendaftar ke sekolah umum, mendapatkan pemeriksaan rutin di kantor

dokter, menerima vaksinasi, atau sejenisnya. *Conditional Cash Transfer* (CCT) yang unik dalam upaya membantu generasi sekarang dalam kemiskinan, serta memutus siklus kemiskinan untuk selanjutnya melalui pengembangan sumber daya manusia.¹⁶

Program Bantuan tunai bersyarat (CCT) telah menerima peningkatan perhatian di negara-negara berkembang dalam 15 tahun terakhir. Program CCT memberikan hibah tunai kepada masyarakat miskin dengan kondisi bahwa keluarga penerima mengirim balita mereka untuk melakukan cek up kesehatan dan anak-anak usia sekolah ke sekolah. Hal ini karena di sebagian besar negara berkembang keluarga miskin memiliki sedikit akses ke atau tidak menggunakan fasilitas kesehatan untuk perawatan preventif anak (seperti vaksinasi) dan mungkin tidak mendaftarkan anak-anak usia sekolah di sekolah-sekolah atau anak-anak mungkin tidak menghadiri kelas secara teratur selama sekolah tahun. Dengan demikian, CCT memberi bantuan sosial sementara cukup memberikan support investasi dalam modal kemanusiaan bagi keluarga miskin untuk mengurangi kemiskinan di masa depan. CCT telah menjadi populer baru-baru ini karena mereka telah berhasil (misalnya, untuk meningkatkan konsumsi, mengurangi kesenjangan kemiskinan, dan meningkatkan indikator kesehatan dan pendidikan anak-anak). Keberhasilan didokumentasikan dalam evaluasi dampak ilmiah dilakukan pada kebanyakan program CCT,

¹⁶ Paul Glewwe, Ana Lucia Kassouf, "The Impact of the Bolsa Escola/Familia Conditional Cash Transfer Program on Enrollment, Drop Out Rates and Grade Promotion in Brazil." August 2010. E-Book diakses dan diterjemahkan pada 20 September 2013.

terutama di negara-negara Amerika Latin (misalnya, Kolombia, Honduras, Meksiko, Nikaragua dan).¹⁷

Tulisan ini membahas tentang desain dan implementasi kegiatan utama program CCT, menunjukkan tantangan utama berhadapan dengan lembaga pelaksana Program CCT dan juga manajer. Beberapa masalah yang paling penting berkaitan dengan pengaturan kelembagaan untuk tata kelola program CCT (koordinasi layanan di seluruh kondisi CCT) dan operasi. Dalam perjalanannya Kementerian kesejahteraan sosial sering menghadapi beberapa tantangan dalam pelaksanaan CCT, termasuk kelemahan institusional, campuran keterampilan yang tidak memadai, dan teknologi informasi yang sangat lemah (TI) dan sistem informasi manajemen (MIS). Tantangan-tantangan ini hanya dapat diatasi dari waktu ke waktu dengan upaya yang signifikan restrukturisasi dalam kementerian (terutama jika program mencapai skala nasional), pekerjaan pasien, dan bantuan teknis yang cukup.

CCT sebagai Komponen Perlindungan Sosial mempunyai pesan bahwa CCT dapat menjadi komponen penting dari sistem perlindungan sosial, tetapi mereka perlu dilengkapi dengan program jaring pengaman lainnya. CCT tidak dapat menjadi instrumen yang tepat untuk semua rumah tangga miskin, misalnya untuk rumah tangga tanpa anak-anak atau untuk rumah tangga tua. CCT adalah instrumen yang lebih baik untuk kemiskinan struktural daripada kemiskinan sementara, yang juga berarti

¹⁷ Fiszbein A., N. Schady, “*Conditional Cash Transfers: Reducing Present and Future Poverty*” (Washington, DC: World Bank, et al. 2009).

bahwa mereka tidak selalu instrumen yang sangat baik untuk menghadapi krisis. Mereka dapat membantu orang-orang yang sedang dalam program tetapi tidak dapat membantu orang-orang yang berada di luar program dan dapat terkena dampak negatif krisis. CCT melengkapi program-program seperti padat karya, asuransi pengangguran, dan pensiun sosial.¹⁸

b. Kekuatan *Conditional Cash Transfer*

Dalam pembahasan ini penulis akan menyoroti lima kunci kekuatan perlindungan sosial dan CCT; *Pertama*, perlindungan sosial memiliki beberapa pembenaran konseptual, termasuk orang-orang yang etis, moral, dan kemanusiaan; hak asasi manusia; sosial; politik; dan ekonomi. Sehubungan dengan argumen pembangunan ekonomi, perlindungan sosial memberikan kontribusi terhadap ekonomi *Disampaikan oleh David E. Bloom. Para penulis mengucapkan terima kasih Marija Ozolins untuk kontribusi. kesejahteraan dengan mengurangi kemiskinan dan kerentanan dalam jangka pendek, serta dengan mempromosikan akumulasi modal manusia dan, oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan lebih stabil dalam jangka panjang (pada prinsipnya).¹⁹

¹⁸ De Janvry A., and E. Sadoulet “*Making Conditional Cash Transfers More Efficient: Designing for Maximum Effect of the Conditionality*”. (World Bank Economic Review 20, 2006), hlm. 29.

¹⁹ Duryea S., and A. Morrison, “*The Effect of Conditional Cash Transfers on School Performance and Child Labor: Evidence from an Ex-Post Impact Evaluation in Costa Rica*” (Research Department Working Paper 505. Washington, DC: IADB, 2004).

Kekuatan *kedua*; berhubungan dengan analisis yang sangat mendasar oleh Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) yang secara empiris menunjukkan keterjangkauan paket penting dari perlindungan sosial (ILO 2008).

Ketiga; CCT memiliki daya tarik alami untuk berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat miskin dan rentan, pemerintah nasional, organisasi internasional seperti Bank Pembangunan Asia (ADB); lembaga swadaya masyarakat seperti Self Employed Asosiasi Perempuan (SEWA) dari India; dan orang-orang kelas menengah dan atas di negara-negara berkembang anggota ADB (DMC), yang terdiri dari sebagian besar basis pajak. Selain itu, tampaknya bagi saya bahwa kepentingan stakeholder ini selaras cukup baik, yang menjadi pertanda baik bagi perkembangan portofolio perlindungan sosial.

Kekuatan *keempat*; menyangkut desain inheren fleksibel perlindungan sosial dan CCT. Sebuah keutamaan yang besar dari program ini adalah bahwa mereka dapat disesuaikan untuk heterogenitas besar yang kita lihat dalam kebutuhan perlindungan sosial DMC dan kapasitas, dan konteks historis, politik, ekonomi, dan sosial mereka. Saya berbicara di sini tentang berbagai instrumen yang tersedia (dari transfer ke asuransi untuk mekanisme pensiun), dan aku juga berbicara tentang berbagai fitur desain dalam mekanisme ini (misalnya, uang tunai dibandingkan dalam bentuk transfer; bersyarat dibandingkan tanpa syarat transfer). Ada banyak kesempatan untuk sekuensing pengembangan perlindungan sosial, seperti

yang disorot oleh banyak lintasan mungkin dalam cakupan versus "ruang berbunyi" di tangga perlindungan sosial ILO. Gagasan fleksibilitas juga mencakup fitur self-skala dari banyak program perlindungan sosial. Mereka tumbuh dalam ukuran selama kemerosotan dan menyusut selama pemulihan dan, semua hal lain yang dimiliki sama, dengan pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Kekuatan *kelima*; perlindungan sosial dan CCT adalah bahwa mereka bergerak ke permukaan kesadaran di kalangan pembuat kebijakan dan pemikir terkemuka. Saya menemukan sangat menarik pengumuman konferensi September 2009 di Hanoi dan persetujuan PBB Kepala Eksekutif untuk menunjuk ILO dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sebagai lembaga utama di bidang perlindungan sosial. Sebagai samping, slogan yang baik dapat membantu untuk meningkatkan kesadaran dan penerimaan dari perlindungan sosial; Saya terutama seperti slogan yang diusulkan oleh Sekretaris Kamboja Negara Ngy Chanphal: ". Investasi sekarang, atau bayar kemudian".

c. Kelemahan *Conditional Cash Transfer*

Sehubungan dengan kelemahan perlindungan sosial dan CCT, ada empat poin umum. Yang pertama harus dilakukan dengan pembenaran untuk perlindungan sosial dan CCT. Saya mencatat pembenaran sedang sebagai kekuatan, tapi satu peringatan adalah gagasan bahwa CCT mungkin bertentangan dengan pembenaran hak. Secara khusus, CCT dapat

membantu orang menyadari hak atas standar hidup yang layak, tapi unsur persyaratan menunjukkan bahwa kegagalan untuk mematuhi kondisi dapat menyebabkan penolakan hak untuk standar hidup yang layak. Sebuah murni hak tidak akan menemukan bahwa dapat diterima, dan ini juga dapat menggosok orang dengan cara yang salah. Ada juga beberapa kekhawatiran praktis yang berhubungan dengan stigma yang terkait dengan pengiriman CCT. Kesenjangan dalam dasar bukti adalah kelemahan kedua perlindungan sosial dan CCT. Meskipun kami masuk akal bisa membantah bahwa perlindungan sosial mendorong pertumbuhan pendapatan, kita belum memiliki bukti dasar menentukan untuk mendukung dalil bahwa; Selain itu, kami belum memperkirakan tingkat pribadi dan sosial pengembalian untuk program perlindungan sosial dan CCT. Beberapa pembicara selama lokakarya ini mencatat sifat campuran bukti tentang pengaruh CCT pada hasil sumber daya manusia yang sebenarnya.

Para pembuat kebijakan mungkin sangat khawatir tentang prospek yang menangkap manfaat dari CCT membutuhkan investasi pelengkap besar dalam kualitas sistem kesehatan dan pendidikan. Bukti lebih lanjut juga diperlukan pada bahaya dan ketergantungan implikasi moral dari beberapa mekanisme perlindungan sosial (seperti asuransi pengangguran tanpa syarat terhadap asuransi pengangguran dikondisikan pada pelatihan dan pencarian). Bukti seperti yang diinginkan karena dorongan dari ketergantungan adalah salah satu tantangan paling serius untuk

mentransfer program, yang secara tradisional pilar perlindungan sosial. Masalah desain adalah kelemahan ketiga perlindungan sosial dan CCT. Hal ini mengacu pada kesulitan yang banyak dibahas dari penargetan dan kebanyakan pilihan desainer perlindungan sosial miliki. Karena keunggulan sering musuh yang baik, jumlah menakutkan dari perlindungan sosial fitur rancangan program belum tentu kebajikan. Minimal, memaksakan pada peneliti beban besar perakitan tubuh besar teori dan bukti mengenai pro dan kontra dari setiap pilihan. Sedangkan pemanfaatan layanan kesehatan dapat meningkatkan sebagai akibat dari CCT, kita juga ingin tahu apakah kesehatan sebenarnya membaik. Beban ini diperbesar oleh interaksi antara fitur desain yang berbeda, yang berarti bahwa kita harus mengetahui pro dan kontra dari fitur ini secara individual maupun dalam konser. Masalah lain yang mungkin desain perlindungan sosial harus dilakukan dengan fakta bahwa tidak semua risiko yang dapat didiversifikasi. Misalnya, memikirkan kemampuan dari setiap program perlindungan sosial di dunia untuk menahan wabah global H1N1 (flu babi) atau H5N1 (flu burung). Oleh karena itu, beberapa kerendahan hati diperlukan ketika datang ke klaim yang kita buat tentang perlindungan sosial.²⁰

²⁰ Johannsen J, A. Glassman, and L. Tejerina “*Conditional Cash Transfer (CCT) Programs in the Context of the Financial Crisis in LAC*”. (Unpublished. Washington, DC: IADB, 2009).

d. Pengertian Evaluasi

Charles O. Jones mengemukakan bahwa: *“evaluation is an activity which can contribute greathly to the understanding and improvement of policy development and implementation”*.²¹

Dari pengertian tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa evaluasi kebijakan itu mempunyai peranan yang sangat penting untuk perkembangan dan kemajuan suatu negara. Dengan evaluasi, kelemahan dan kekurangan sejak direncanakan sampai pada pelaksanaan dapat diketahui. Selanjutnya dengan mengetahui kekurangan dan kelemahan serta ketidaklancaran dan ketidak berhasilan tersebut akan dapat diupayakan perbaikan melalui perumusan kembali kebijakan atau penyesuaian yang sejalan dengan kondisi masyarakat yang berkembang.

Evaluasi itu memang perlu dilakukan mulai dari langkah-langkah awal. Dengan maksud agar kekeliruan dan kekurangan-kekurangan tersebut tidak akan berlanjut membawa akibat yang buruk atau merugikan. Dengan demikian perbaikan dan pembetulan dalam mengambil kebijakan dapat dilakukan sedini mungkin. Hal itu berarti:

- 1) Pemborosan tenaga, pikiran dan waktu dapat ditanggulangi.
- 2) Kekeliruan keputusan dan langkah-langkah yang salah dapat segera diperbaiki.
- 3) Perbaikan dan penyempurnaan kegiatan-kegiatan segera dapat diadakan.

²¹ F.W. Riggs, *"Bureaucrats and Political Development : A Paradoxical View"* (La Paromba, Paris. 1967), hlm. 56.

James E. Anderson mengatakan bahwa : *“policy evaluation as a fungsional activity is as old as policy itself policy-makers and administrator have always made judgement concerning the worth or effects of particular policies, programs, and projects.”*²²

Seyogyanya evaluasi itu sudah harus dilakukan mulai dari perencanaan (*Planning*) suatu program atau kebijakan itu dilaksanakan. Penilaian suatu kebijakan sebelum pelaksanaannya dapat disebut dengan *“Pretesting”* (evaluasi pendahuluan). Merupakan kegiatan yang penting untuk mengusahakan efisiensi, penghematan-penghematan dan usaha-usaha ekonomis lainnya, seperti yang pernah dikemukakan :

- 1) Ada kemungkinan kondisi dalam masyarakat atau publik sudah berubah sehingga tidak sama dengan kondisi pada waktu program tersebut diolah dan ditetapkan.
- 2) Kemungkinan biaya-biaya yang dapat ditiadakan atau ditekan karena perkembangan keadaan.

Dengan demikian, maka evaluasi kebijakan sangatlah penting dan perlu, tidak hanya untuk mengkaji bahwa hasil kebijakan itu memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat, tetapi juga tiap-tiap kegiatan dalam program tersebut dilakukan dengan efisien dan efektif dengan hasil kegiatan yang nyata dan bermanfaat bagi keseluruhan pelaksanaan.

²² Ibid, hlm 57-58

Sesuai dengan uraian diatas, maka istilah evaluasi mempunyai cakupan yang cukup luas, yang dapat mengarah kepada setiap kegiatan dalam pengambilan kebijakan. Carol H. Weis mengatakan bahwa :

“Evaluation is an elastic word that stretches to cover judgement of many kinds” (Evaluasi adalah suatu kata yang elastis yang dapat meluas meliputi penilaian kebenaran dan keberhasilan mengenai banyak hal). Ditegaskan pula oleh Weis, bahwa semua penilaian itu berisikan penentuan keberhasilan dari setiap pelaksanaan suatu program atau keputusan.

e. Tujuan Evaluasi

Tujuan evaluasi yaitu untuk memperoleh hasil yang sebaik-baiknya dengan jalan dan cara seefisien mungkin dalam perkembangan masyarakat. Dalam melaksanakan evaluasi kebijakan tersebut, timbullah suatu kegiatan-kegiatan perbaikan pelaksanaan dengan cara sebagai berikut:

- 1) Menunjukkan kekeliruan-kekeliruan dan kesalahan-kesalahan.
- 2) Menunjukkan cara atau metode yang lebih sesuai dengan kondisinya, dilihat dari sudut *cost benefit*.
- 3) Memberikan kritik-kritik yang membangun yang dapat mencegah pelaksanaan terbawa oleh arus yang keliru.
- 4) Memberikan pertimbangan kepada pengambil kebijakan. Agar pelaksanaan kebijakan atau program mencapai keberhasilan sebagaimana diharapkan dengan hasil yang semestinya.

Charles O. Jones juga mengemukakan bahwa : “*Evaluation is an activity designed to judge the merits of government program which varies significancy in the spesification of object, the technique measurement, and the method of analysis.*” (evaluasi adalah kegiatan yang dipersiapkan dan ditujukan untuk menilai mutu dan keberhasilan program pemerintah, terdiri dari kegiatan penilaian objek, cara pengukuran dan metode analisa).²³

Evaluasi itu dilakukan dalam dua bentuk yaitu :

- 1) Evaluasi Teknis (ilmiah), dengan kegiatan antara lain :
 - a) Penilaian-penilaian objek dengan merinci apa saja yang dievaluasi.
 - b) Melakukan pengukuran tiap-tiap objek dalam koleksi data serta menentukan ukuran-ukuran yang benar dan cocok setiap objeknya.
 - c) Melakukan analisa dari setiap informasi yang ada.
 - d) Memberikan pendapat atau rekomendasi ini dapat bersifat *advocative*, diharap untuk diikuti dan dilaksanakan. Dapat pula bersifat *coercive*, dipaksa untuk dilaksanakan, hal ini tergantung pada kedudukan formal dengan *authority* pelaku evaluasi tersebut.

Evaluasi teknis merupakan evaluasi yang lebih bersifat rasional. Dilakukan terutama oleh orang-orang yang banyak terlibat dalam pengambilan kebijakan. Mereka lebih terikat dengan keberhasilan kebijakan dan merasa ikut bertanggungjawab atas keberhasilannya. Evaluasi inilah yang disebut Jones sebagai *specialized evaluation*.

²³ F.W. Riggs, "Bureaucrats and Political Development : A Paradoxical View". (La Paromba, Paris. 1967) hlm. 60.

2) Evaluasi Umum

Biasanya dilaksanakan oleh rakyat dengan berbagai kepentingan serta tingkat pengalaman dan pengetahuan yang berbeda. Dalam evaluasi ini sering terjadi titik berat penilaian yang berbeda antara suatu kelompok dengan kelompok yang lainnya. Disamping itu, keterkaitan orang atau kelompok masyarakat dengan pendirian kelompok, ideologi dan pandangan atau pendapat umum sering sekali mewarnai kegiatan serta hasil evaluasinya.

Evaluasi inilah yang disebut sebagai *broader scaled evaluation*. Pada umumnya dilakukan organisasi-organisasi partai politik atau lembaga-lembaga politik seperti DPR/DPRD. Lembaga-lembaga tersebut diatas sering kali melakukan evaluasi yang bertujuan *purposive evolution* dan oleh karena itu sangat bersifat praktis. Pada gilirannya timbullah hasil dari *broader scaled evaluation* ini bersifat dukungan terhadap suatu kebijakan atau tuntutan untuk perubahan kebijakan atau malah tuntutan pergantian terhadap kebijakan yang ada.

f. Fungsi Evaluasi

Evaluasi memainkan sejumlah fungsi utama dalam analisis kebijakan yaitu:

- 1) Evaluasi memberi informasi yang valid dan tepat untuk dipercaya, dimana seberapa jauh kebutuhan nilai dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik.

- 2) Evaluasi dapat memberi sumbangan klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target.
- 3) Evaluasi dapat memberi masukan pada penerapan metode kebijakan lainnya, dengan menunjukkan kekurangan kebijakan sebelumnya.

Tabel 1
INDIKATOR EVALUASI²⁴

KRITERIA	BENTUK PERTANYAAN
Efektifitas	Apakah Hasil yang diinginkan telah tercapai?
Efisiensi	Seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan?
Kecukupan	Apakah hasilnya telah memenuhi kebutuhan?
Pemerataan	Apakah manfaatnya sudah merata dirasakan semua pihak?
Responsivitas	Seberapa jauh pencapaian hasil telah memecahkan permasalahan?
Ketepatan	Apakah hasil yang dicapai benar-benar bernilai?

Sumber; *Results-Oriented Monitoring and Evaluation: A Handbook for Programme Managers*. Office of Evaluation and Strategic Planning

2. Kemiskinan

a. Pengertian Kemiskinan

Breadley R. Schiller mendefinisikan kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk mendapatkan barang-barang dan pelayanan-

²⁴ Office of Evaluation and Strategic Planning. 'Results-Oriented Monitoring and Evaluation: A Handbook for Programme Managers', (UNDP: New York. 1997), E-Book diakses pada 29 November 2013.

pelayanan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial yang terbatas.²⁵

Selanjutnya Emil Salim menyatakan bahwa kemiskinan adalah suatu keadaan yang menunjukkan kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup pokok. Sedangkan Parsudi Suparlan menyebutkan kemiskinan adalah suatu standar tingkat hidup yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau segolongan masyarakat yang bersangkutan.²⁶

Nataatmaja, mengatakan dengan masuknya unsur moral dalam sistem pasar, lingkaran kemiskinan dapat diputuskan. Pendapat ini didasarkan pada sumber dan akar kemiskinan itu sendiri yang terletak pada khazanah pikiran manusia. Bentuk pikiran manusia ini tercipta karena terlalu kuatnya pengaruh falsafah Neo-kalsik di dalam kehidupan manusia dan dalam setiap kebijakan pembangunan yang berjalan.²⁷

Problematika kemiskinan masih merupakan tantangan serius yang dihadapi masyarakat, khususnya di Indonesia. Selain masih rendah, IPM (*Income Proverty Minimum*) Indonesia juga semakin tertinggal oleh negara-negara tetangga di ASEAN dan telah terkejar oleh Vietnam. Kebijakan dan program pembangunan yang lebih *pro-poor* tampaknya harus lebih mendapat prioritas di tahun-tahun mendatang, terutama bagi kelompok-

²⁵ Selo Soemardjan, Dkk. "Kemiskinan Struktural". (Jakarta : PT. Sanghal Pulsar. 1984), hlm. 75

²⁶ Bagong Suyanto, "Perangkap Kemiskinan, Problem dan Strategi Pengentasannya", (Surabaya : Airlangga University Press. 1995)

²⁷ Nataatmaja, Hidayat. "Mencari Akar dan Sumber Kemiskinan." Bogor : IPB Makalah Online. Dalam www.ibp.com, diakses 13 Oktober 2013 pukul 22.00wib.

kelompok miskin dan rentan dalam masyarakat, seperti orang miskin dengan kecacatan (OMDK), orang miskin dengan HIV/AIDS (OMDHA), dan anak-anak yang memerlukan perlindungan khusus.

Modal sosial memiliki kontribusi penting dalam menopang pembangunan. Pendekatan dalam meningkatkan IPM dan memerangi kemiskinan di Indonesia tidak mesti hanya dilakukan melalui pemberdayaan ekonomi saja, melainkan pula melalui penguatan modal sosial. Skema-skema perlindungan sosial, seperti asuransi sosial, bantuan sosial (*social assistance*), *conditional cash transfer* (CCT), *social safety nets* bisa dijadikan pendekatan dalam mengentaskan kemiskinan. Dipadukan dengan konsep *Corporate Social Responsibility* dengan *Community Development* nya, model-model jaminan sosial berbasis masyarakat yang bermatra Islam bisa menjadi pilihan.²⁸

Menurut BPS dan Depsos (2002) kemiskinan merupakan sebuah kondisi yang berada di bawah garis nilai standar kebutuhan minimum, baik untuk makanan dan non makanan, yang disebut garis kemiskinan (*poverty line*) atau batas kemiskinan (*poverty treshold*). Garis kemiskinan yaitu sejumlah rupiah yang diperluakan oleh setiap individu untuk dapat membayar kebutuhan makanan setara dengan 2100 kilo kalori per orang per hari dan kebutuhan non makanan yang terdiri dari perumahan, pakaian, kesehatan, pendidikan, transportasi, serta aneka barang dan jasa lainnya.²⁹

²⁸ Edi Suharto, "Islam, Modal Sosial dan Pengentasan Kemiskinan," Dalam Indonesia Social Economic Outlook Dompot Dhuafa, Jakarta 8 Januari 2008, hlm. 7.

²⁹ Badan pusat Statistik., '*Pelaksanaan Pendataan Rumah Tangga Miskin*', (Jakarta: Badan Pusat Statistik Press, 2005).

Kemiskinan itu bersifat multi dimensional. Artinya karena kebutuhan manusia itu bermacam-macam maka kemiskinan pun memiliki banyak dimensi. Kemiskinan dapat dilihat dalam dua bentuk, yaitu :

- 1) Kemiskinan Absolut (mutlak), yakni keadaan individu/kelompok masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan yang ditentukan menurut ukuran tertentu.
- 2) Kemiskinan relatif (nisbi) yakni keadaan dimana kesejahteraan orang atau kelompok dibandingkan dengan kesejahteraan orang atau kelompok lain.

Sedangkan dari kebijakan umum, maka kemiskinan tersebut dapat dilihat dari dimensi primer, dalam wujud miskin akan asset, organisasi dan politik, pengetahuan serta keterampilan. Dan dimensi sekunder, yakni wujud miskin tersebut ditujukan oleh jaringan sosial. Sumber-sumber keuangan dan informasi.³⁰

Dari beberapa pendapat tentang kemiskinan tersebut diatas, peneliti memilih fokus pada pengertian kemiskinan menurut Badan Pusat Statistik dan Dinas Sosial yakni : kemiskinan merupakan sebuah kondisi yang berada di bawah garis nilai standar kebutuhan minimum, baik untuk makanan dan non makanan, yang disebut garis kemiskinan (*poverty line*) atau batas kemiskinan (*poverty treshold*). Garis kemiskinan yaitu sejumlah rupiah yang diperlukan oleh setiap individu untuk dapat membayar kebutuhan makanan setara dengan 2100 kilo kalori per orang per hari dan kebutuhan non makanan yang terdiri dari perumahan, pakaian, kesehatan, pendidikan,

³⁰ Mukhtar Sarman & Sayogyo. 'Masalah Penanggulangan Kemiskinan', (Jakarta : Puspa Swara, 2000)

transportasi, serta aneka barang dan jasa lainnya. Penjelasan kemiskinan tersebut sangat sesuai dengan kondisi kemiskinan di Indonesia.

b. Faktor Penyebab Kemiskinan

Kemiskinan yang menimpa sekelompok masyarakat berhubungan dengan status sosial ekonominya dan potensi wilayah. Faktor sosial ekonomi yaitu faktor yang berasal dari dalam diri masyarakat itu sendiri dan cenderung melekat pada dirinya seperti tingkat pendidikan dan keterampilan yang rendah, tingkat kesehatan yang rendah dan produktifitas yang rendah pula, sedangkan faktor yang berasal dari luar berhubungan dengan potensi alamiah teknologi dan rendahnya aksesibilitas terhadap kelembagaan yang ada.

Tadaro 1993 memperlihatkan jalinan antara kemiskinan dan keterbelakangan dengan beberapa aspek ekonomi dan aspek non ekonomi. Tiga komponen utama sebagai penyebab keterbelakangan dan kemiskinan masyarakat yaitu: a) rendahnya taraf hidup; b) rendahnya rasa kepercayaan diri; c) terbatasnya kebebasan. Ketiga aspek tersebut memiliki hubungan secara timbal balik. Rendahnya taraf hidup disebabkan oleh rendahnya produktifitas tenaga kerja. Dan rendahnya produktifitas tenaga kerja disebabkan oleh tingginya pertumbuhan tenaga kerja. Tingginya angka pengangguran, dan rendahnya investasi perkapita.³¹

Secara lebih khusus studi Hayami (1985), di Indonesia, Malaysia dan Thailand, menemukan bahwa kemiskinan dan ketidakmerataan disebabkan oleh

³¹ Michael P. Todaro, "*Economic Development in the Third World*" Terjemahan Burhanuddin Abdullah. "Pembangunan Ekonomi di Dunia ke Tiga", (Jakarta: Erlangga. 1993), hlm. 98.

beberapa faktor antara lain: 1) Produktifitas tenaga kerja yang rendah sebagai akibat rendahnya teknologi, penyediaan tanah dan modal jika dibanding dengan tenaga kerja; 2) tidak meratanya distribusi kekayaan terutama tanah.³² Selanjutnya untuk kasus Indonesia Ginanjar (1996), mengemukakan empat faktor penyebab kemiskinan, faktor-faktor tersebut yaitu: 1) rendahnya taraf pendidikan; 2) rendahnya taraf kesehatan; 3) terbatasnya lapangan kerja; 4) kondisi keterisolasian.³³

Lebih jauh suyanto menyebutkan dalam Bukunya "*Perangkap Kemiskinan Problem dan Strategi Pengentasannya*" menyebutkan ada beberapa faktor penyebab kemiskinan yang terjadi dalam suatu masyarakat, seperti:

- 1) Kemiskinan karena Kolonialisme; kemiskinan ini terjadi karena penjajahan yang dilakukan oleh suatu bangsa terhadap bangsa lain, sehingga bangsa yang dijajah menjadi tertindas baik bidang ekonomi, politik dan sebagainya. Misalnya: Indonesia yang ditindas oleh Belanda.
- 2) Miskin karena kondisi sosio kultural, hal ini berkaitan dengan suku bangsa tertentu yang kental kebudayaannya seperti suku kubu di sumatera dan suku Dayak di pedalaman Kalimantan.
- 3) Miskin karena terisolasi; seseorang menjadi miskin karena tempat tinggalnya jauh dari keramaian sehingga sulit berkembang.

³² Hayami dan Peter. "*Agriculture Development and International Perspective*" (London : John Hopkins Press), dalam www.ipb.com diakses pada 9 Oktober 2013 pukul 19.56wib.

³³ Ginanjar Satari, dan Kedi Suradisastra. "*Upaya Pendidikan dalam Pengentasan Kemiskinan di Desa Tertinggal*" (Bandung : IKIP. 1994).

- 4) Kemiskinan struktural; kemiskinan struktural ialah kemiskinan yang ditengarai atau didalihkan bersebab dari kondisi struktur atau tatanan kehidupan yang tidak menguntungkan. Kemiskinan ini juga disebabkan oleh persaingan yang tidak seimbang antar negara atau daerah yang mempunyai keunggulan komparatif dengan daerah sekitarnya yang tidak mempunyai keunggulan komparatif.

c. Penanggulangan Kemiskinan

Dalam upaya penanggulangan kemiskinan, terlebih dahulu dipahami apa itu kemiskinan dan apa penyebab kemiskinan, selanjutnya untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan langkah yang dilakukan tidak lain yaitu: mengubah kondisi lingkungan menjadi lebih baik, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan melakukan perbaikan terhadap sistem yang ada melalui pembatasan korupsi dan menetapkan pengelola yang kompeten baik dari kemampuan, integritas, maupun moral.

Penanganan ini tentunya harus dilakukan secara menyeluruh dan kontekstual. Menyeluruh berarti menyangkut seluruh penyebab kemiskinan, sedangkan kontekstual mencakup faktor lingkungan si miskin beberapa di antaranya yang menjadi bagian dari penanggulangan kemiskinan tersebut perlu tetap ditindaklanjuti dan disempurnakan implementasinya. Perluasan akses kredit pada masyarakat miskin,

peningkatan pendidikan masyarakat, perluasan lapangan kerja dan pembudayaan *entrepreneurship*.³⁴

d. Rumah Tangga Miskin

Konsep kemiskinan terkait dengan kemampuan seseorang/rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan dasar baik untuk makanan maupun non makanan. Seseorang/rumah tangga dikatakan miskin bila kehidupannya dalam kondisi serba kekurangan. Sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Batas kebutuhan dasar minimal dinyatakan dengan ukuran garis kemiskinan yang disetarakan dengan jumlah yang dibutuhkan yaitu:

a. Fakir Miskin

1900 kalori/orang/hari + kebutuhan dasar non makanan
= Rp. 120.000/orang/bulan

b. Miskin

Antara 1900 – 2100 kalori/orang/hari + kebutuhan non makanan
= Rp. 150.000/orang/bulan

c. Rentan Miskin

Antara 2100 – 2300 kalori/orang/hari + kebutuhan non makanan
= Rp. 175.000/orang/bulan

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Rumah Tangga Miskin didefinisikan sebagai mereka yang mempunyai pengeluaran per kapita Rp 175.000/orang/bulan atau kurang. Mereka mendefinisikan dengan

³⁴ Tjahya Supriana, Birokrasi, ''Pemberdayaan dan Pengentasan Kemiskinan'' (Bandung : Humaniora Utama Press. 2000), hlm 76.

menggunakan metode uji pendekatan kemampuan (*proxy means testing*).³⁵

Tabel 2
Kriteria Rumah Tangga Miskin Menurut Badan Pusat Statistik³⁶

No.	Variabel	Kriteria Rumah Tangga Miskin
1.	Luas Lantai Bangunan tempat tinggal	Kurang dari 8 m ² per orang
2.	Jenis Lantai Bangunan Tempat Tinggal	Tanah/tembok/kayu murahan
3.	Jenis Dinding	Bambu/kayu kualitas rendah/tak di plester
4.	Fasilitas MCK	Tidak punya/bersama dg RTM lain
5.	Sumber Penerangan	Bukan Listrik
6.	Sumber Air Minum	Sumur/mata air terlindung/sungai/hujan
7.	Bahan bakar untuk masak	Kayu bakar/ arang minyak tanah
8.	Konsumsi Daging/susu/Ayam/minggu	Tidak pernah mengkonsumsi/ sekali/minggu
9.	Pembelian Pakaian Tiap Tahun	Tidak pernah Membeli, Hanya 1 stel/tahun
10.	Makanan dalam sehari	Hanya sekali/ dua kali makan sehari

³⁵ “Jumlah Rumah Tangga Miskin Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) 2013” dalam www.kemensos.com, diakses Online Tanggal 5 Oktober 2013.

³⁶ Ibid. hlm. 49.

11.	Kemampuan membayar Untuk berobat puskesmas	Tidak mampu membayar untuk berobat
12.	Lapangan Pekerjaan Utama	Petani dg Luas lahan 0,5ha/buruh tani/buruh lain dg hasil dibawah Rp. 600.000/bln
13.	Pendidikan tertinggi	Tidak sekolah/tidak tamat SD
14.	Pemilikan Asset/tabungan	Tidak punya tabungan.

e. Program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM)

Pemerintah menetapkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di dalam negeri pada 22 April 2013. Kenaikan ini memperberat beban hidup masyarakat, terutama kelompok miskin. Untuk mengurangi beban tersebut pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2013 tentang pelaksanaan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) kepada Rumah Tangga Miskin (RTM), besar bantuan Rp. 150.000 per rumah tangga per bulan selama 1 caturwulan atau setara dengan 4 bulan.

Program pemberian BLSM ini bertujuan untuk :

- a. Melindungi keluarga miskin dari dampak langsung kenaikan BBM;
- b. Mempertahankan kemampuan daya beli sumber energi keluarga miskin;
- c. Menjaga stabilitas dan gejolak sosial masyarakat yang rentan terhadap pengaruh psikologis.

Selanjutnya, wilayah pendataan BLSM ini mencakup seluruh Satuan Lingkungan Setempat (SLS) yang ada di Indonesia. Sedangkan mekanisme pendataan dilapangan adalah : berawal dari proses penjarangan

RTM dilakukan dengan pencacahan dari rumah ke rumah (*door to door*) yang dilaksanakan oleh petugas pencacah lapangan (PCL) dengan Petugas Pengawas Lapangan (PML) yang ditunjuk oleh BPS Kabupaten/Kota.³⁷

Yang tidak dicakup dalam pendataan PSE 13 adalah : 1) Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Anggota TNI/Polri/pensiunan. 2) Penghuni Kamp/Barak Pengungsi/Penerima Jadup. 3) Tunawisma/Gelandangan /Mahasiswa yang kost.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Deskriptif Kualitatif. Cakupan metode deskriptif kualitatif yakni sebagai kumpulan data empiris, hasil wawancara, teks-teks hasil pengamatan, dan visual yang menggambarkan makna keseharian. Hal tersebut merupakan tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial dan sangat tergantung pada pengamatan manusia yang berkaitan dengan orang-orang tertentu yang ada di lingkungannya.³⁸ Dalam konteks metode deskriptif kualitatif Suharsimin menyatakan metode deskriptif kualitatif meliputi (1) wilayah tempat untuk

³⁷ “Pedoman dan Panduan TKSK, P4 dan BLSM Kementerian Sosial Republik Indonesia”, (Jakarta : Kemensospress, 2013).

³⁸ Komaruddin, “*Metode Penelitian Skripsi dan Tesis*” (Bandung: Aksara, 1997), hlm. 113.

mendapatkan data (2) dalam teknik pengumpulan data dan (3) analisis data, sehingga mendapatkan data yang valid.³⁹

2. Subyek dan Obyek Penelitian

Subyek penelitian adalah sumber-sumber yang memungkinkan untuk memperoleh keterangan penelitian atau data. Subyek dalam penelitian ini dibagi menjadi dua *cluster*; *cluster pertama*: informan dari Pengelola Program, yakni; 5 orang petugas yang terdiri dari: Kepala Dinas Sosial Kota Yogyakarta/ yang mewakili, Kepala TKSK (Pendamping BLSM), Pendamping P4S (Program Percepatan dan Perluasan Perlindungan Sosial), Pelaksana Pencairan BLSM yakni Kepala Kantor Pos.

Cluster kedua yakni: informan yang merupakan Penerima Manfaat Program, yang terdiri dari 30 peserta RTM Kelurahan Hargobinangun, yang cara pengambilan sampling nya diambil 10 persen dari total penduduk Miskin yang ada di kelurahan Hargobinangun, kemudian dari 10% tersebut peneliti berkomunikasi dan berdiskusi secara *intensive* dengan Kepala Dukuh di masing-masing padukuhan yang ada di Kelurahan Hargobinangun, Kecamatan Pakem Kabupaten Sleman, Yogyakarta yang kemudian menghasilkan 30 nama yang merupakan representasi dari tiga cluster Kemiskinan di Hargobinangun yakni: Rentan miskin, Miskin dan Fakir Miskin. Hal tersebut sangat penting dilakukan oleh peneliti mengingat Kepala Dukuh adalah orang yang paling berpengaruh serta mengetahui

³⁹ Suharsimin Arikunto. "Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktis" (jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm.183.

seluk-beluk Padukuhan hingga lini terkecil sekalipun, sehingga menjadi sebuah keharusan bagi peneliti untuk menanyakan informan manakah yang paling mumpuni dan dapat mewakili data dari 3 cluster yang ada. Selanjutnya obyek evaluasi pelaksanaan program BLSM yang akan diteliti adalah Kelembagaan, Kepesertaan, Program, Pembiayaan, dan Pemberi Pelayanan.

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini bersumber pada data primer dan sekunder. Data primer berupa ungkapan-ungkapan verbal (kata-kata) yang didapatkan dari subyek penelitian sebagaimana tersebut diatas, yang dipilih dalam penelitian ini. Data sekunder bersumber pada jurnal-jurnal ilmiah, dokumen-dokumen, buku-buku, majalah, koran, arsip-arsip, perundang-undangan dan berbagai referensi yang relevan dengan masalah penelitian.⁴⁰

3. Informan dan Teknik Pengambilan Informan

Berkaitan dengan metode penelitian yang telah disebutkan, maka pelaksanaan penelitian dilakukan tidak pada keseluruhan populasi tersebut.

a. Informan

Teknik pengambilan informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Cluster Sampling* (Sampling Kelompok). Menurut Idrus (2009:78) *Cluster Sampling* (Sampling Kelompok) digunakan apabila didalam populasi penduduk terdapat kelompok-kelompok yang mempunyai ciri-

⁴⁰ Lexi. J. Meleong. ''Metode Penelitian Kuantitatif. Edisi Revisi'' (Bandung: Remaja Rosdakarya. 2013), hlm. 186.

ciri tersendiri, ciri-ciri tersebut dapat berupa pekerjaan subjek, jenis kelamin, kelompok sosial, yang tidak ada menunjukkan adanya tingkat antar kelompok. Seperti kelompok PNS, kelompok petani, sebagai contoh kelompok khusus pekerjaan.⁴¹

b. Teknik Pengambilan Informan

Informan adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Sedangkan jenis teknik sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Cluster Sampling* (Sampling Kelompok).⁴² Sampel kelompok dilakukan dengan cara mengambil subjek didasarkan atas strata, jenis kelamin atau keadaan sosial ekonomi. Teknik ini biasanya dilakukan karena beberapa pertimbangan, misalnya alasan didalam populasi penduduk terdapat kelompok-kelompok yang mempunyai ciri-ciri tersendiri. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam mengambil sampel jenis ini:

- 1) Pengambilan sampel harus didasarkan atas ciri-ciri, sifat-sifat atau karakteristik tertentu, yang merupakan ciri-ciri kelompok populasi.
- 2) Subyek yang diambil sebagai sampel benar-benar merupakan subyek yang paling banyak mengandung ciri-ciri yang terdapat pada kelompok populasi.

⁴¹ Muhammad Idrus, "*Metode Penelitian Ilmu Sosial*" (Yogyakarta: Erlangga, 2009).

⁴² Suharsimi Arikunto. "*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*" Edisi Revisi V, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm.15.

3) Penentuan karakteristik populasi dilakukan dengan cermat didalam studi pendahuluan.⁴³

4. Teknik Pengumpulan Data

Ada 3 teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini :

a. Observasi

Observasi dalam penelitian ini dilakukan sejak bulan September tahun 2013 di Kelurahan Hargobinangun, Kecamatan Pakem Kabupaten Sleman, DIY dengan objek observasi *cluster* miskin yang ada dan para petinggi kelurahan, baik tokoh agama, kepala dukuh bahkan hingga kepala kelurahan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan observasi yang tidak berstruktur. Observasi yang tidak berstruktur adalah observasi yang tidak disiapkan secara sistematis tentang apa yang akan diobservasi. Dalam melakukan pengamatan penelitian, peneliti tidak menggunakan instrumen yang telah baku, tetapi hanya berupa rambu-rambu pengamatan. Oleh karena itu peneliti dapat melakukan pengamatan bebas serta melakukan analisis, kemudian dibuat kesimpulan. Fokus observasi akan berkembang selama kegiatan observasi berlangsung.⁴⁴

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu teknik dengan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada pada benda-benda tertulis seperti buku-buku,

⁴³ Ibid . hlm.17.

⁴⁴ Soegiyono, “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*” (Bandung : Alfabeta. 2010), hlm. 219.

jurnal, karya ilmiah, notulensi, peraturan-peraturan, catatan harian dan sebagainya, dokumentasi yang diambil oleh peneliti adalah menyangkut dokumentasi berupa rekaman wawancara lengkap dengan transkripnya, foto informan lengkap beserta rumahnya dan hal lain yang berhubungan dengan penelitian.⁴⁵ Penulis juga menggunakan informasi dari internet untuk melengkapi penelitian tentang BLSM ini.

c. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data melalui metode wawancara terhadap *Key person* (orang kunci) atau yang menjadi informan (pemberi informasi) dalam penelitian ini, yang disajikan dalam bentuk pertanyaan yang berkenaan dalam tema yang diinginkan.⁴⁶ dalam penelitian ini penulis mewawancarai pihak-pihak yang terkait dengan BLSM yang merupakan 10% bagian dari penduduk miskin Kelurahan Hargobinangun, Pakem, Sleman, Yogyakarta. 10 % penduduk tersebut adalah representasi dari penduduk miskin penerima manfaat program BLSM yang terbagi dalam tiga *cluster* yakni; rentan miskin, miskin dan fakir miskin yang tersebar di 13 Padukuhan di Kelurahan Hargobinangun. Wawancara dilakukan dengan mendatangi satu per satu rumah warga, membagikan angket dan juga wawancara mendalam.

⁴⁵ Suharsimin Arikunto. ''Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktis'' (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm.183.

⁴⁶ Lexi. J. Meleong. ''Metode Penelitian Kuantitatif. Edisi Revisi'' (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), hlm 186.

G. Teknik Analisis Data

Dalam analisis data penulis menggunakan metode perbandingan secara tetap atau (*Constant Comparatif Method*). Kemudian secara tetap membandingkan kategori dengan kategori lainnya. Secara umum proses analisis data mencakup: reduksi data, kategorisasi data dan sintesisasi.

1. Reduksi Data

Identifikasi satuan (unit). Pada mulanya diidentifikasi adanya satuan yaitu bagian terkecil yang ditemukan dalam data yang memiliki makna bila dikaitkan dengan fokus dan masalah penelitian. Sesudah satuan diperoleh, langkah berikutnya adalah membuat koding. Membuat koding berarti memberikan kode pada setiap satuan agar tetap dapat ditelusuri data/satuannya dari sumber mana.

2. Kategorisasi

Menyusun Kategori. Kategorisasi adalah upaya memilah-milah setiap satuan ke dalam bagian-bagian yang memiliki kesamaan. Setiap kategori diberi nama yang disebut label.

3. Sintesisasi

Mensintesisasikan berarti mencari kaitan antara satu kategori dengan kategori lainnya. Kaitan satu kategori dengan kategori lainnya diberi nama/label lagi.⁴⁷

⁴⁷ Sugiyono, "*Metode Penelitian*" hlm. 288-289.

H. Uji Validitas Data

Prinsip validitas dalam penelitian ini diperlukan dan digunakan agar semua informasi dan hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan dan diimplementasikan berdasarkan pada bukti-bukti yang jelas sesuai dengan prinsip-prinsip kebenaran dalam ilmu pengetahuan. Karena penelitian ini merupakan integrasi yang menerapkan prinsip-prinsip penelitian dasar dan terapan, empiris dan subjektif. Dalam hal ini validitas penelitian menitikberatkan pada penelitian kualitatif yang diterapkan dengan teknik triangulasi. Triangulasi data merujuk pada Patton (1984) yang memasukkan keragaman perspektif teori dan metodologi. Triangulasi data yaitu: teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan suatu yang lain, di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data tersebut.⁴⁸

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang sistematis dan ilmiah. Secara garis besar, sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab kesatu: yaitu berupa pendahuluan yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Penyajian proposal ini karena menyangkut maksud mengapa dan bagaimana penelitian ini dilakukan.

⁴⁸ Robert K. Yin, "*Studi Kasus: Design dan Metode*", Terjemah M. Jazuli Mudzkir, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 330.

Bab kedua: membahas tentang gambaran umum lokasi penelitian di kelurahan Hargobinangun, meliputi tentang, gambaran lokasi penelitian dan kondisi geografis, kondisi demografis, kondisi sosial ekonomi, kondisi sarana dan prasarana serta keadaan rumah tangga miskin penerima BLSM di Hargobinangun.

Bab ketiga: membahas mengenai pelaksanaan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) di Kelurahan Hargobinangun dan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) Nasional. Terdiri tiga sub bab, pertama membahas tentang profil BLSM, meliputi: tentang tujuan umum dan khusus BLSM, prinsip dasar BLSM, pendanaan: memuat, pendanaan BLSM, mekanisme pencairan dana BLSM dan mekanisme penyaluran dana BLSM. Kedua, membahas tentang proses pelaksanaan BLSM. Ketiga, membahas tentang indikator keberhasilan dan kegagalan BLSM secara *mikro, mezzo* dan *makro*.

Bab keempat: adalah bab yang terakhir dalam proposal tesis ini, yaitu bab penutup membahas tentang kesimpulan dan saran-saran penulis serta rekomendasi yang bermanfaat bagi lembaga terkait.

BAB IV

KESIMPULAN, SARAN DAN PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan BLSM Sesuai Yang di Tuju

Dari hasil penelitian yang dilakukan di Kelurahan Hargobinangun, Kecamatan Pakem Kabupaten Sleman, DIY diperoleh kesimpulan bahwa program BLSM dianggap sebagai program yang sangat menarik dan mengiurkan bagi masyarakat miskin, dengan dana tersebut masyarakat miskin terbantu untuk mengurangi beban hidup, dan harus diakui bahwa program pemerintah yang satu ini telah berjalan sesuai dengan sasaran yang dituju, yakni disalurkan kepada masyarakat miskin sesuai dengan *cluster* yang ada di kelurahan masing-masing. Dalam Studi kasus di Kelurahan Hargobinangun Kecamatan Pakem kabupaten Sleman, *cluster* masyarakat miskin tersebut dibagi menjadi tiga yakni; *cluster* Rentan Miskin, Miskin dan Fakir Miskin dari tiga *cluster* tersebut total penerima BLSM di Hargobinangun adalah 308 Jiwa Penduduk yang kesemuanya menerima bantuan dengan baik, tanpa dipungut potongan sedikitpun dari pemerintah desa-nya, selanjutnya para penerima bantuan BLSM pun merasa lebih mudah mengakses bantuan dibandingkan ketika masa penerimaan BLT di tahun 2005 silam. Namun hal tersebut tidak kemudian membuat BLSM menjadi program yang berjalan tanpa koreksi, masih ada banyak kasus yang terjadi di beberapa Padukuhan di Kelurahan Hargobinangun yang mungkin dapat dijadikan cerminan untuk program

lain di kemudian hari. Sebut saja masih banyaknya data penduduk yang belum diperbaharui, beberapa informan mengatakan sering mendengar adanya protes di Padukuhan karena merasa lebih miskin dari tetangga sekitar rumahnya yang notabene menjadi penerima bantuan, namun Ia sendiri tidak mendapatkan BLSM dari pemerintah. Hal tersebut merupakan satu dari banyak kasus yang harus menjadi catatan agar dikemudian hari tidak terulang kembali.

2. Pengaruh Program BLSM Bagi Rumah Tangga Miskin

Menjawab Rumusan Masalah yang Kedua, Peneliti mengambil tiga *sample* dari enam indikator evaluasi dalam penelitian BLSM ini. Ada 3 poin yang dapat menjadi jawaban tentang bagaimanakah pengaruh program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat di Kelurahan Hargobinangun??

Pertama; dari Segi Kecukupan, pemberian BLSM sebesar Rp.150.000,- perbulan selama 4 bulan masih belum dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga miskin, bahkan beberapa dari informan menyatakan lebih memilih harga BBM tidak naik ketimbang menerima BLSM. Karena dengan demikian harga-harga kebutuhan pokok dengan sendirinya tidak akan naik.

Kedua; dari Segi Pemerataan, bahwa BLSM belum merata diterima oleh rumah tangga yang layak, memang mayoritas penerima program adalah keluarga/rumah tangga miskin. Namun, di satu pihak

masih banyak keluarga/rumah tangga miskin yang tidak menjadi penerima (*undercoverage*), disisi lain juga kami temukan temuan terkait keluarga/rumah tangga yang mampu malah mendapatkan bantuan dari program BLSM ini. Hal ini terbukti dari beberapa wawancara dengan warga di beberapa kelurahan yang mengeluh mengetahui ada tetangga mereka yang mempunyai taraf hidup yang lebih tinggi masih mendapatkan bantuan kompensasi kenaikan harga BBM dari pemerintah berupa BLSM, hal tersebut yang sering kali mengundang protes besar dari warga yang kemudian aspirasinya disampaikan kepada kepala Dukuh masing-masing wilayah.

Ketiga; dari Segi Responsivitas, pemberian BLSM bagi rumah tangga miskin sesungguhnya tidak memecahkan akar permasalahan kemiskinan. Walau pemerintah memberi subsidi dengan membagi bagi uang kepada rakyat miskin setiap bulannya kalau kebutuhan dasar masyarakat sulit dijangkau tentu program ini bukan kebijakan optimal.

3. Efektifitas Program BLSM Bagi Rumah Tangga Miskin

Untuk menjawab rumusan masalah yang ketiga, peneliti akan menyuguhkan 3 poin lain dari 6 indikator evaluasi yang merupakan hasil wawancara mengenai bagaimanakah efektifitas program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat di Kelurahan Hargobinangun sebagai berikut:

Pertama; dari segi efektifitas, program BLSM belum berhasil mencapai tujuan seperti apa yang diharapkan oleh pemerintah yaitu meringankan beban pengeluaran rumah tangga miskin, pemberian BLSM hanya dapat meredam gejala sosial yang bisa timbul disebabkan kebijakan kenaikan harga BBM.

Kedua; dari Segi Efisiensi, bahwa kebijakan kenaikan harga BBM akan menambah porsi penduduk miskin. Sementara itu, program BLSM kadang dapat mengurangi laju pertumbuhan proporsi penduduk miskin.

Ketiga; Segi Ketepatan, pemberian BLSM memang disambut dengan penuh suka cita oleh keluarga miskin karena diharapkan untuk membantu perekonomian keluarga dan dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, sebut saja beberapa contoh warga yang menggunakan dana ini untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pembelian buku sekolah anak, rokok, atau bahkan untuk membayar hutang, sebuah langkah pemanfaatan bantuan yang sebenarnya kurang tepat dilakukan karena sejatinya pemberian bantuan BLSM tersebut untuk mensubsidi warga memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari disaat harga kebutuhan dasar mulai meningkat. Namun tindakan warga tersebut juga tidak dapat disalahkan karena tidak adanya peraturan yang baku terkait penggunaan BLSM tersebut dari pemerintah pusat, hal tersebut kemudia disinyalir menjadi alasan masyarakat mempergunakan dana BLSM sesuai dengan kebutuhan *urgent* masing-masing keluarga.

Secara umum program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) terkesan sebagai program “dadakan” yang hanya mengejar target waktu untuk meredam gejolak sosial akibat kenaikan harga BBM. Dilihat dari peringanan beban, jumlah dana yang sangat minim dan jarak yang terlalu jauh sangat tidak efektif, maka dapat dipastikan pemerintah tidak akan berhasil untuk mengeluarkan permasalahan kemiskinan bagi rakyat melalui program BLSM dengan jumlah dana yang sangat jauh dari yang seharusnya. Secara sadar kenaikan BBM berdampak pada melambungnya harga bahan pokok, seharusnya pemerintah bisa lebih kreatif dalam memberikan solusi bagi rakyat miskin, dan membuat inovasi baru, karena melihat dari fenomena sebelumnya melalui program BLT yang terbukti tidak berpengaruh untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin di Indonesia.

Dari 6 poin evaluasi diatas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa program BLSM yang diberikan oleh pemerintah atas Inpres No.5 Tahun 2013 dalam prakteknya merupakan program yang sangat tidak efektif di masyarakat, namun di sisi lain program BLSM ini cukup berpengaruh bagi peningkatan daya beli terhadap barang dan jasa bagi sebagian penduduk miskin di Kelurahan Hargobinangun Kecamatan Pakem Kabupaten Sleman DIY.

B. Saran

Adanya berbagai kendala di lapangan akibat sifat program BLSM yang *'Accidental'*, menunjukkan bahwa perencanaan dan *design* yang baik adalah factor penting dalam setiap upaya penanggulangan kemiskinan. Pengembangan mekanisme pelaksanaan yang baik dan melibatkan potensi lokal merupakan salah satu aspek yang perlu tercakup dalam sebuah rencana kegiatan karena dapat menjadi sarana umpan balik bagi perbaikan program selanjutnya.

Jika pemerintah akan mengadakan pergantian program BLSM dengan program lain, maka sudah selayaknya kita harus mendukung bersama, dengan catatan adanya perbaikan menyeluruh mulai dari mekanisme bantuan sampai pada organisasi yang menyalurkan bantuan pada keluarga/rumah tangga miskin yang benar-benar berhak menerima dan perlu adanya audit terhadap mekanisme dan organisasi yang menyalurkan bantuan tersebut.

Ada pepatah lama berkata: *'Jika ingin membantu seseorang, berikanlah kail bukan ikannya'*.⁷⁸ Karena jika ikan yang diberi akan habis dalam waktu cepat, sedangkan jika kail yang diberi maka akan dapat menghasilkan ikan untuk jangka yang lebih lama dan akan menghasilkan ikan yang banyak pula. Asalkan kail yang diberikan benar-benar dapat digunakan dengan baik dan tepat sasaran. Berikut ini adalah masukan beberapa *alternative* program yang dapat diaplikasikan pemerintah untuk menjadi *second program* setelah BLSM :

⁷⁸ Dunia Penyair, *"Kumpulan Paribahas Melayu, Simpulan Bahasa dan Maksud"* dalam www.wordpress.com, diakses pada 27 September 2014 pukul : 20.00wb.

1. Program Proyek Sistem Padat Karya :

Program ini bukan seperti bantuan langsung sementara masyarakat,

- A. tetapi merupakan program pengadaan pekerjaan bagi masyarakat miskin yang belum memiliki penghasilan maupun pekerjaan tetap dengan latar belakang pendidikan yang relatif rendah. Pemerintah dapat membuat suatu proyek atau kegiatan yang mengandung pekerjaan yang pekerjanya adalah masyarakat yang berasal dari keluarga/rumah tangga miskin yang tidak mampu secara ekonomi dan tidak memiliki pekerjaan tetap namun memiliki usia yang sangat produktif.

2. Program Pendidikan Non-Formal (Program Keterampilan Bagi Masyarakat)

Program ini adalah memberikan pendidikan pada masyarakat kurang mampu atau tidak memiliki pekerjaan tetap dalam bentuk keahlian-keahlian atau keterampilan khusus yang disesuaikan dengan kondisi setempat. Pemerintah dapat mendirikan sekolah/lembaga khusus yang menampung dan mendidik anak-anak putus sekolah atau anak-anak dari keluarga/rumah tangga miskin yang tidak sekolah karena alasan ekonomi mereka berasal dari masyarakat golongan lemah.

3. Program Unit Usaha Khusus

Pemerintah dapat mendirikan unit-unit usaha untuk menampung masyarakat dari golongan lemah, dimana pekerjanya berasal dari golongan

tersebut. Contohnya: Perusahaan textile, perkebunan, perikanan, peternakan, minyak dan gas bumi, perusahaan tambang, perusahaan penyedia jasa pariwisata atau unit usaha lain yang dimiliki oleh pemerintah sesuai dengan potensi masing-masing daerah.

Diwaktu yang akan datang, program ''dadakan'' yang dirancang instan untuk mengurangi dampak sosial dari kebijakan lainnya sepatutnya sudah tidak diimplementasikan kembali. Belajar dari kedaruratan program BLT ditahun 2005 dan BLSM di tahun 2013 lalu, maka pemerintah tidak perlu menunggu persoalan menjadi genting, baru kemudian meng-eksekusi ''kebijakan dadakan tersebut''.

4. Memberikan dana bergulir melalui lembaga koperasi.
5. Membangun infrastruktur pemerintahan.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi rakyat miskin.
7. Meningkatkan sarana-prasarana serta kualitas pendidikan bagi rakyat miskin.
8. Memberikan pelatihan melalui BLK untuk meningkatkan SDM.
9. Memberikan dan mempermudah akses bantuan permodalan bagi UKM baik yang dilakukan secara individu maupun kelompok di masyarakat.
10. Membangun saran prasaran umum yang bisa dinikmati dalam jangka waktu panjang.
11. Mengembangkan usaha, baik usaha mikro, mezzo dan makro.
12. Megembangkan sektor pertanian dan peternakan di dalam negeri sehingga tidak tergantung pada import.

C. Penutup

Dengan dana sebesar Rp. 30 triliun banyak hal yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat, BLSM hanya bersifat sangat sementara, seharusnya Program BLSM harus dianalisis lebih jauh, sehingga manfaatnya lebih bisa di nikmati dalam jangka waktu yang lama, melalui kerjasama dengan koperasi dengan memberikan pinjaman modal secara bergulir dan tentunya imbas positif akan lebih besar, maka masyarakat tentunya akan lebih bisa memanfaatkan dana tersebut untuk membuat usaha yang lebih besar, dengan demikian sedikit demi sedikit pemerintah akan bisa mengeluarkan masyarakat dari jeratan lingkaran setan kemiskinan.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku :

- Badan pusat Statistik. *Pelaksanaan Pendataan Rumah Tangga Miskin*. Jakarta. 2005
- Daniel L. Sufflebeam, dan Anthony J. Shinkfield. 1986, *Systematic Evaluation: A Self Instructional guide to Theory and Practice*. Boston: Kluwer-nijhoff Publishing (E-Book).
- De Janvry, A., and E. Sadoulet. 2006. "Making Conditional Cash Transfers More Efficient: Designing for Maximum Effect of the Conditionality". *World Bank Economic Review* 20 pp. 1–29.
- Duryea, S., and A. Morrison. 2004. "The Effect of Conditional Cash Transfers on School Performance and Child Labor: Evidence from an Ex-Post Impact Evaluation in Costa Rica" (Research Department Working Paper 505. Washington, DC: IADB).
- Fiszbein, A., N. Schady et al. 2009. *Conditional Cash Transfers: Reducing Present and Future Poverty*. Washington, DC: World Bank.
- Johannsen, J., A. Glassman, and L. Tejerina "Conditional Cash Transfer (CCT) Programs in the Context of the Financial Crisis in LAC". (Unpublished. Washington, DC: IADB, 2009)
- Glewwe, Paul; Kassouf, Ana Lucia. "The Impact of the Bolsa Escola/Familia Conditional Cash Transfer Program on Enrollment, Drop Out Rates and Grade Promotion in Brazil." August 2010 (E-Book)
- Hadari, Nawawi. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta : UGM Press. 1996.
- Hasibuan, Nurimansyah. *Pemerataan dan Pembangunan Ekonomi, Teori dan Kebijakan*. Palembang : Unibversitas Sriwijaya. 1999
- Idrus, Muhammad. *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Yogyakarta: Erlangga. 2009
- Irawan, Soehartono. *Metode Penelitian Sosial. Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial lainnya*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2011.
- Komaruddin, *Metode Penelitian Skripsi dan Tesis*. (Bandung:Aksara) 1997.

- Lexi. J. Meleong. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Edisi Revisi. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2013
- Panduan TKSK, P4 dan BLSM Kementerian Sosial Republik Indonesia. Jakarta : 2013.
- Riggs. F.W. *Bureaucrats and Political Development : A Paradoxical View*. La Paromba, Paris. 1967.
- _____, *Results-Oriented Monitoring and Evaluation: A Handbook for Programme Managers*. Office of Evaluation and Startegic Planning. UNDP. New York. 1997. (E-Book Diakses pada 29 November 2013)
- Sarman, Mukhtar & Sayogyo. *Masalah Penanggulangan Kemiskinan*. Jakarta : Puspa Swara. 2000
- Satari, Ginanjar. dan Kedi Suradisastra. *Upaya Pendidikan dalam Pengentasan Kemiskinan di Desa Tertinggal*. Bandung : IKIP. 1994
- Soemardjan. Selo, Dkk. *Kemiskinan Struktural*. Jakarta : PT. Sanghal Pulsar. 1984.
- Soegiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta. 2010.
- Suharsimin, Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Edisi Revisi V. Jakarta: Rineka Cipta . 2002.
- Suyanto, Bagong. *Perangkap Kemiskinan, Problem dan Strategi Pengentasannya*. Surabaya : Airlangga University Press. 1995
- Supriana, Tjahya. *Birokrasi, Pemberdayaan dan Pengentasan Kemiskinan*. Bandung : Humaniora Utama Press. 2000.
- S. Nasution. *Metode Penelitian Naturalistik-Kwalitatif*. Bandung : Tarsito. 1992.
- Todaro, Michael P. *Economic Development in the Third World*. Terjemahan Burhanuddin Abdullah. "Pembangunan Ekonomi di Dunia ke Tiga" Jakarta: Erlangga. 1993. hlm. 98
- _____, UU No 11 Tahun 2009, 'Undang-undang tentang Kesejahteraan Sosial'' Pasal 1 ayat 9
- _____, Tim Sosialisasi Penyesuaian Subsidi Bahan Bakar Minyak, 'Buku Pegangan Sosialisasi dan Implementasi Program-Program Kompensasi

Kebijakan Penyesuaian Subsidi Bahan Bakar Minyak’. Sekretariat Wakil President Republik Indonesia. Jakarta: 2013

Referensi Penelitian :

Sumarto, Sudarno. *Program Dana Tunai Untuk Penduduk Miskin; Belajar dari Program Progresa/Oportunidades di Mexico*. Lembaga Penelitian Semeru, Jakarta. 2005.

Tolang L., Sutan. Tesis: “*Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai di Medan Johor*”. Kota Medan. Sumatra: Universitas Sumatra Utara. 2005

Setiawan, Warih Budiono. Tesis: “*Evaluasi Proses Pelaksanaan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) di Kecamatan Karangmojo Kabupaten Gunungkidul*” Daerah Istimewa Yogyakarta: Universitas Gajahmada. 2010

Tulisan Di Koran :

Mardinal, Eri. “*Kisruh Pembagian BLSM*” dalam *Padang Express*. 27 Juli 2013. Online Newspaper/ Diakses pada 13 Oktober 2013 pukul 14.30wib

Riyandi, Saugi. “*Kenaikan Harga BBM 22 April 2013*” dalam *Merdeka.com*. 21 Juni 2013. Diakses pada 13 Oktober 2013 pukul 20.00wib

Ramadhani, Rahmi Suci. “*Ombudsman DIY Terima 350 aduan Penyaluran BLSM*”. Dalam *Republika.co.id*. 25 Juni 2013. Online Newspaper/ Diakses pada 3 Oktober 2014 pukul 10.00wib

Referensi Internet :

_____, Dunia Penyair, *Kumpulan Paribahas Melayu, Simpulan Bahasa dan Maksud*. www.wordpress.com. (diakses pada 27 September 2014 pukul : 20.00wb)

Grehenson, Gusti. “*Pemerintah, Evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan*” dalam *Ugm.ac.id*. juni 2013. Diakses Pada 10 Oktober 2013 Pukul 09.00wib

Hayami dan Peter. *Agriculture Development and International Perspective*. London : John Hopkins Press. Dalam www.ipb.com diakses pada 9 Oktober 2013 pukul 19.56wib.

_____, “*Jumlah Rumah Tangga Miskin Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) 2013*” dalam www.kemensos.com. Diakses Online Tanggal 5 Oktober 2013.

Nataatmaja, Hidayat. “Mencari Akar dan Sumber Kemiskinan.” Bogor : IPB Makalah Online. Dalam www.ipb.com. Diakses 13 Oktober 2013 pukul 22.00wib.

Wiranto, Rihad. “*Arti BLSM Bagi Kaum Miskin*”, Jurnal Nasional Online. 25 Juni 2013. Hlm. 14 (Diakses Pada 11 Oktober 2013 pukul 23.00wib).



GAMBAR RUMAH WARGA PENERIMA BLSM

1. CLUSTER RENTAN MISKIN

A. Halaman Depan



B. Ruang Tengah



C. Fasilitas MCK (Mandi Cuci Kakus)



2. CLUSTER MISKIN

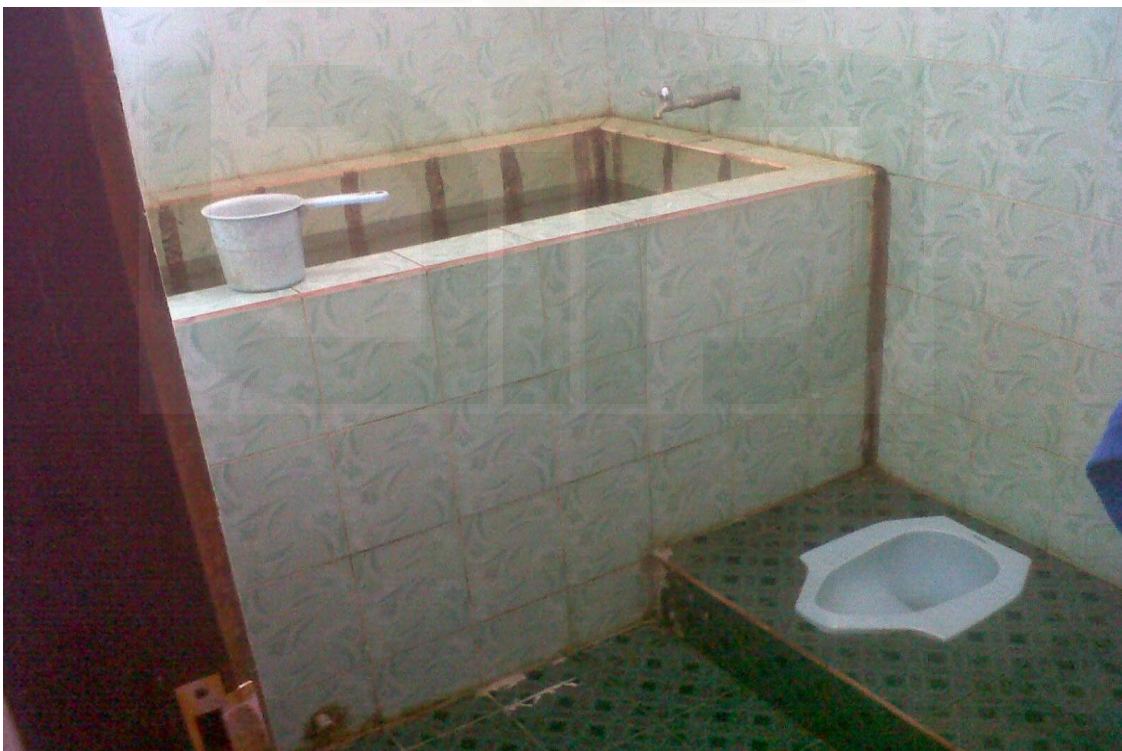
A. Halaman Depan



B. Ruang Tengah



C. Fasilitas MCK (Mandi Cuci Kakus)



3. BLSM CLUSTER MISKIN

A. Halaman Depan



B. Ruang Tengah



C. Fasilitas MCK (Mandi Cuci Kakus)





**MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS
STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
CENTER FOR LANGUAGE DEVELOPMENT**

JL. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 550727 Yogyakarta 55281

TEST OF ENGLISH COMPETENCE CERTIFICATE

No : UIN.02/L.5/PP.00.9/5428.b /2014

Herewith the undersigned certifies that:

Name : **Fikriyah Asmawati**
Date of Birth : **February 20, 1989**
Sex : **Female**

took **TOEC (Test of English Competence)** held on **September 19, 2014** by Center for Language Development of Sunan Kalijaga State Islamic University Yogyakarta and got the following result:

CONVERTED SCORE	
Listening Comprehension	49
Structure & Written Expression	46
Reading Comprehension	48
Total Score	476

**Validity : 2 years since the certificate's issued*



Yogyakarta, September 26, 2014

Director

[Signature]
Dr. Hisyam Zaini, M.A.

NIP. 19631109 199103 1 002



NOMOR : UIN.02/R.7/PP.01.1/0067.1567/2011

IJAZAH

**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**



dengan ini menyatakan bahwa :

lahir di **Gresik** tanggal **20 Pebruari 1989** telah menyelesaikan dengan baik dan memenuhi segala syarat pendidikan Strata Satu Program Studi **Ilmu Komunikasi** pada Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora. Oleh sebab itu kepadanya diberikan gelar :

SARJANA ILMU KOMUNIKASI (S.I.Kom.)

beserta segala hak dan kewajiban yang melekat pada gelar tersebut.
Diberikan di **Yogyakarta** pada tanggal **dua puluh satu bulan Juni tahun dua ribu sebelas**.



DEKAN
Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora

[Signature]

Prof. Dr. BUDUNG ABDURAHMAN, M.Hum.
NIP. 19630306 198903 1 010



REKTOR

[Signature]

Prof. Dr. H. MUSA ASY'ARIE
NIP. 19511231 198003 1 018



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 585300 Fax. 519571
YOGYAKARTA 55281




TRANSKRIP NILAI
PROGRAM SARJANA (S1)

N A M A : FIKRIYAH ASMAWATI
 NIM : 07730077
 PROGRAM STUDI : ILMU KOMUNIKASI
 NOMOR IJAZAH : UIN.02/R.7/PP.01.1/0067.1567/2011

No	Nama Matakuliah	SKS	Nilai	Bobot	No	Nama Matakuliah	SKS	Nilai	Bobot
1	AKHLAK TASAWUF	2	A/B	7,00	38	PENGANTAR ILMU POLITIK	2	A-	7,50
2	AL-HADIS	2	A/B	7,00	39	PENGANTAR SOSIOLOGI	2	A	8,00
3	AL-QUR'AN	2	A-	7,50	40	PENGANTAR STUDI ISLAM	4	A	16,00
4	ANALISIS WACANA	3	A-	11,25	41	PERILAKU KONSUMEN	3	A	12,00
5	BAHASA ARAB	2	A	8,00	42	PERSPEKTIF DAN TEORI KOMUNIKASI	4	A/B	10,50
6	BAHASA INDONESIA	2	B	6,00	43	POLITIK ISLAM	2	A	8,00
7	BAHASA INGGRIS	2	B+	6,50	44	PSIKOLOGI KOMUNIKASI	3	A	12,00
8	BROADCASTING	2	B+	6,50	45	PUBLIC OPINION	4	A/B	10,50
9	COMM. RELATION & DEVELOPMENT	3	A-	11,25	46	PUBLIC SPEAKING	4	A-	11,25
10	DASAR-DASAR ADVERTISING	3	B+	9,75	47	RISET PUBLIC RELATIONS	4	A/B	10,50
11	DASAR-DASAR MANAJEMEN	2	A-	7,50	48	SEJARAH KEBUDAYAAN ISLAM	2	B+	6,50
12	DASAR-DASAR PUBLIC RELATIONS	3	A	12,00	49	SISTEM KOMUNIKASI INDONESIA	4	A/B	7,00
13	ENTREPRENEURSHIP	2	A/B	7,00	50	SISTEM POLITIK INDONESIA	4	A-	7,50
14	FILSAFAT DAN ETIKA KOMUNIKASI	3	A/B	10,50	51	SISTEM SOSIAL BUDAYA	2	A-	7,50
15	FILSAFAT ILMU DAN LOGIKA	3	A	12,00	52	SKRIPSI	6	A/B	21,00
16	FIQIH USHUL FIQIH	2	B+	6,50	53	SOSIOLOGI KOMUNIKASI	3	A/B	10,50
17	GENDER DAN MEDIA MASSA	2	A/B	7,00	54	STATISTIK SOSIAL	3	A/B	10,50
18	HUMAN RELATIONS	3	A-	11,25	55	TAUHID	2	A-	7,50
19	ISLAM DAN BUDAYA LOKAL	2	B+	6,50	56	TEHNIK PENULISAN PUBLIC RELATIONS	3	A/B	10,50
20	JURNALISTIK	2	A	8,00	57	TEHNOLOGI KOMUNIKASI	2	A	8,00
21	KOMUNIKASI DALAM AL-QURAN	2	A-	7,50	58	TEKNIK PRESENTASI DAN NEGOSIASI	3	A	12,00
22	KOMUNIKASI LINTAS AGAMA	3	A	12,00					
23	KOMUNIKASI MASSA	3	A	12,00					
24	KOMUNIKASI PEMASARAN	3	A-	11,25					
25	KOMUNIKASI PEMBANGUNAN	2	B-	5,50					
26	KOMUNIKASI PERSUASIF	3	A	12,00					
27	KOMUNIKASI POLITIK	3	A/B	10,50					
28	KOMUNIKASI PROFETIK	2	A-	7,50					
29	KULIAH KERJA KOMUNIKASI	4	A-	15,00					
30	KULIAH KERJA NYATA	4	A	16,00					
31	MANAJEMEN EVENT ORGANIZER	3	B+	9,75					
32	MANAJEMEN PUBLIC RELATIONS	3	A-	11,25					
33	MET. PENELITIAN KOMUNIKASI	3	B-	8,25					
34	METODE PENELITIAN SOSIAL	3	A/B	10,50					
35	PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN	2	A	8,00					
36	PENGANTAR ANTROPOLOGI SOSIAL	2	A-	7,50					
37	PENGANTAR ILMU KOMUNIKASI	3	A	12,00					

Jumlah SKS : 153
 Indek Prestasi Kumulatif : 3,66 (Tiga Koma Enam Enam)
 Yudisium : DENGAN PUJIAN (CUMLAUDE)
 Judul Skripsi : STRATEGI MARKETING PUBLIC RELATIONS RASULULLAH SAW DALAM BERDAGANG

Yogyakarta, 21 Juni 2011
 Dekan

 Prof. Dr. Dudung Abdurahman, M.Hum
 NIP. 19630306 198903 1 010

A. FORMULIR ISIAN PERMOHONAN IJIN STUDI PENDAHULUAN / PRA SURVEY / PRA PENELITIAN *)

B. SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENYERAHKAN HASIL PENELITIAN / SURVEY / PKL *)

*) Lingkari yang dipilih

Nomor : 070/988

Kami, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Fikriyah Asmawati
2. No. Mahasiswa/NIP/NIM : 12.200.100.35
3. Tingkat (D1/D2/D3/D4/S1/S2/S3) : S2 (Pascasarjana)
4. Universitas/Akademi : UIN Sunan Kalijaga
5. Dosen Pembimbing : Dr. Pajar Hatma, M.Si
6. Alamat Rumah Peneliti : Jln. Blimbing No. 147 RT/RW. 01/01
Durenanyar Kec Duren. Kab. Gresik
7. Nomor Telepon/HP : 0853-2589-4500
8. Lokasi Penelitian/Survey : 1 Kelurahan Hargobinangun
2 Wawancara Dinsof Sleman
9. Judul Penelitian : "Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat di D.1 Yogyakarta (studi kasus di Kelurahan Hargobinangun Kecamatan Pakem Kab. Sleman - D.1.Y.)"

Berdasarkan pilihan saya pada formulir isian diatas (poin B), saya bersedia untuk menyerahkan hasil Penelitian / Survey / PKL berupa 1 (satu) CD format PDF selambatnya 1 (satu) bulan setelah selesai Penelitian / Survey / PKL dilaksanakan.



Sleman, 19 - Maret 2014
Yang menyatakan

Fikriyah Asmawati
(nama terang)



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH
 Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)
 YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN / IJIN

070/REG/VI/384/3/2014

Membaca Surat : **KAPRODI INTERDISCIPLINARY ISLAMIC STUDIES PROGRAM PASCASARJANA** Nomor : **UIN.02/PPS/PP.00.9/495/2014**

Tanggal : **3 MARET 2014** Perihal : **IJIN PENELITIAN/RISET**

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011, tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : **FIKRIYAH ASMAWATI, S.IKOM.** NIP/NIM : **1220010035**
 Alamat : **PASCASARJANA, INTERDISCIPLINARY ISLAMIC STUDIES, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**
 Judul : **EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN LANGSUNG SEMENTARA MASYARAKAT DI YOGYAKARTA (STUDI KASUS DI KELURAHAN HARGOBINANGUN KECAMATAN PAKEM KABUPATEN SLEMAN D.I.YOGYAKARTA)**
 Lokasi : **KABUPATEN SLEMAN**
 Waktu : **14 MARET 2014 s/d 14 JUNI 2014**

Dengan Ketentuan

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari Pemerintah Daerah DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website adbang.jogjaprovo.go.id dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website adbang.jogjaprovo.go.id;
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta
 Pada tanggal **14 MARET 2014**
 A.n Sekretaris Daerah
 Asisten Perekonomian dan Pembangunan
 Ub.
 Kepala Biro Administrasi Pembangunan



Tembusan :

1. GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (SEBAGAI LAPORAN)
2. BUPATI SLEMAN C.Q KA. BAKESBANGLINMAS SLEMAN
3. DINAS SOSIAL DIY
4. KAPRODI INTERDISCIPLINARY ISLAMIC STUDIES PROGRAM PASCASARJANA, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
5. YANG BERSANGKUTAN



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Parasamya Nomor 1 Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta 55511
 Telepon (0274) 868800, Faksimilie (0274) 868800
 Website: slemankab.go.id, E-mail : bappeda@slemankab.go.id

SURAT IZIN

Nomor : 070 / Bappeda / 988 / 2014

**TENTANG
 PENELITIAN**

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Dasar : Peraturan Bupati Sleman Nomor : 45 Tahun 2013 Tentang Izin Penelitian, Izin Kuliah Kerja Nyata, Dan Izin Praktik Kerja Lapangan.
 Menunjuk : Surat dari Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Kab. Sleman
 Nomor : 070/Kesbang/942/2014
 Hal : Rekomendasi Penelitian

Tanggal : 14 Maret 2014

MENGIZINKAN :

Kepada :
 Nama : FIKRIYAH ASMAWATI, S.IKOM
 No.Mhs/NIM/NIP/NIK : 12.200.100.35
 Program/Tingkat : S2
 Instansi/Perguruan Tinggi : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
 Alamat instansi/Perguruan Tinggi : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta
 Alamat Rumah : Jl. Blimbingan Dukunanyar Gresik Jatim
 No. Telp / HP : 085325894500
 Untuk : Mengadakan Penelitian / Pra Survey / Uji Validitas / PKL dengan judul
**EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN LANGSUNG
 SEMENTARA MASYARAKAT DI YOGYAKARTA (STUDI KASUS DI
 KELURAHAN HARGOBINANGUN KECAMATAN PAKEM KABUPATEN
 SLEMAN DIY)**
 Lokasi : Kelurahan Hargobinangun Pakem Sleman
 Waktu : Selama 3 bulan mulai tanggal: 14 Maret 2014 s/d 14 Juni 2014

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. *Wajib melapor diri kepada Pejabat Pemerintah setempat (Camat/ Kepala Desa) atau Kepala Instansi untuk mendapat petunjuk seperlunya.*
2. *Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan setempat yang berlaku.*
3. *Izin tidak disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan di luar yang direkomendasikan.*
4. *Wajib menyampaikan laporan hasil penelitian berupa 1 (satu) CD format PDF kepada Bupati diserahkan melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.*
5. *Izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan di atas.*

Demikian ijin ini dikeluarkan untuk digunakan sebagaimana mestinya, diharapkan pejabat pemerintah/non pemerintah setempat memberikan bantuan seperlunya.

Setelah selesai pelaksanaan penelitian Saudara wajib menyampaikan laporan kepada kami 1 (satu) bulan setelah berakhirnya penelitian.

Dikeluarkan di Sleman

Pada Tanggal : 14 Maret 2014

a.n. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Sekretaris
 u.b.

Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi



Dra. SUCI IRIANI SINURAYA, M.Si, MM
 Pembina, Nya

NIP 19630112 198903 2 003

Tembusan :

1. Bupati Sleman (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Tenaga Kerja & Sosial Kab. Sleman
3. Camat Pakem
4. Kepala Desa Harjobinangun, Pakem
5. Direktur Prog. Pascasarjana-UIN Suka. Yk.
6. Yang Bersangkutan



KECAMATAN PAKEM

Jalan Cangkringan Nomor 03, Pakemtegal, Pakembinangun, Pakem, Sleman, Yogyakarta, 55582
Telepon (0274) 895201, Faksimile (0274) 895201
E-mail: pakem@kecamatan.slemankab.go.id

SURAT KETERANGAN IZIN PENELITIAN

Nomor : 070 / 139 / 2014

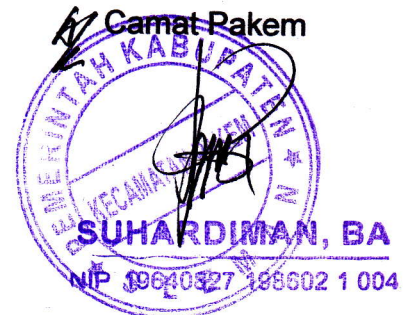
Berdasarkan Surat Izin Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 070/Bappeda/988/2014, tanggal 14 Maret 2014 tentang Penelitian. Dengan ini memberikan persetujuan kepada:

1. Nama : **FIKRIYAH ASMAWATI, S.IKOM**
 NIM : 12.200.100.35
 Program/Tingkat : S2
 Instansi/Perguruan Tinggi : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
 Alamat Perguruan Tinggi : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta
 Alamat Rumah : Jl. Blimbingan Dukunanyar Gresik Jatim
 Nomor Telepon / HP : 085325894500
2. Untuk Keperluan : Mengadakan Penelitian / Pra Survei / Uji Validasi / PKL dengan judul :
EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN LANGSUNG SEMENTARA MASYARAKAT DI YOGYAKARTA (STUDI KASUS KELURAHAN HARGOBINANGUN KECAMATAN PAKEM KABUPATEN SLEMAN DIY)
3. Lokasi : Kabupaten Sleman
4. Waktu : tanggal 14 Maret 2014 s.d. 14 Juni 2014

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharapkan Pemerintah Desa dan Pejabat terkait untuk memberikan bantuan seperlunya sesuai kewenangan masing-masing

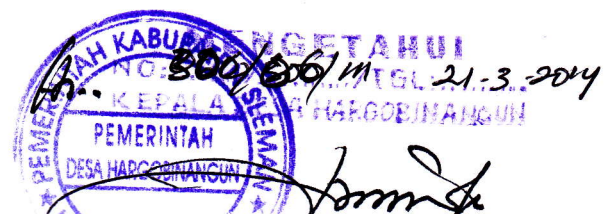
Pakem, 20 Maret 2014

Camat Pakem



Tembusan :

1. Kepala Desa Hargobinangun
2. **Fikriyah Asmawati, S.IKOM**
3. Kasi Pelayanan Umum Kecamatan Pakem



CURRICULUM VITAE



Data Pribadi

- | | |
|-------------------|---|
| Nama lengkap | ○ Fikriyah Asmawati |
| Tempat tgl lahir | ○ Gresik, 20 Februari 1989 |
| Agama | ○ Islam |
| Status perkawinan | ○ Belum Kawin |
| Alamat Asal | ○ Jl.Blimbing No.147 RT.03,RW.01 Dukunanyar Gresik Jawa Timur 61155 |
| Alamat Tinggal | ○ Jl. Kaliurang Km 6 Gang Manggungsari; Komplek Perumahan Pandega Rini 1 No.217c Condong Catur, Depok Sleman DIY. |
| Alamat Email | ○ Fikriyah.asad@gmail.com |
| Nomor HP | ○ 085 325 894 500 / 082 227 373 640 |

Kualifikasi yang Dimiliki

- Memahami pengetahuan tentang Ilmu Komunikasi.
- Memahami Ilmu Kesejahteraan Sosial Sangat Baik
- Mampu berkomunikasi dengan sangat baik.
- Mampu bekerja sendiri maupun dalam tim.
- Menyukai tantangan.
- Mampu bekerja dalam tekanan dan bekerja dengan tenggat waktu.
- Seorang pekerja keras, ulet, Tangguh dan dapat dipercaya.

-
- Seorang yang Inovatif
 - Berbahasa Inggris pasif.
 - Berbahasa Arab Pasif
 - Menguasai MS Office
 - Menguasai MS Excell
 - Menguasai MS Power Point
 - Menguasai Praktek Pekerjaan Online (Based On Internet)

Pengalaman Kerja

- Marketing Executive (ME) Cristal Indonesia Manajemen.
Yogyakarta, Maret-Mei 2009
- Magang Kerja Sekretaris Kepala Dinas Reguler (Sekpri) Dinas Pariwisata Prov. D.I Yogyakarta, Desember 2010-Januari 2011
- Public Relations Manager Walasry Creative Media Yogyakarta, Februari 2011-Juni 2012
- Publik Relation Officer Victory International Futures Yogyakarta, Juli 2012- Desember 2012
- Marketing Executive PT. Bhumi Artha Nugraha November 2012 - Januari 2013
- Human Resources Development Staff MitraMandiriGroup
Yogyakarta, Februari 2013- 2104 (Sekarang)

Pengalaman Organisasi

- Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi (BEM-Ps Ikom) Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2008-2010.
- Direktur Management Produksi UKM Jama'ah Cinema Mahasiswa (JCM) UIN sunan kalijaga yogyakarta 2008-2009.
- Koordinator Jaringan dan Komunikasi (JARKOM) Ikatan Pelajar Puteri (IPPNU) Pimpinan Cabang Sleman Yogyakarta 2007-2009.
- Koordinator Media dan Jaringan PW IPPNU DIY
- Koordinator Kreasi Seni Remaja Gresik (KRESEG)Ikatan Mahasiswa Gresik Yogyakarta2008-2010
- Pengurus Rayon Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia(PMII) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2009-2010.
- MENKOMINFO Dewan Eksekutif Mahasiswa UIN Suka (2010-2011)

- Sekjen IMIKI (Ikatan Ilmu Komunikasi Indonesia) Korwil 3 Wilayah Yogya, Solo, Semarang. (2010-2012)
- Foundation Chief Mahasna Foundation Yogyakarta Tahun 2012-2013 (Komunitas Sosial CV. Mahasna Property).
- Ketua 2 PW. IPPNU DIY Masa Bhakti (2012-2015)
- Koordinator Bidang Pengkaderan PP. IPPNU (Resufle Kabinet II Pimpinan Pusat) Masa Bhakti (2013-2015)

Pendidikan

Sarjana Predikat Terbaik Tercepat Ilmu Komunikasi dari UIN Sunan Kalijaga Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora dengan IPK 3, 68 dalam skala 4 pada bulan Juli 2011 (Masa Studi 3 Tahun 5 Bulan).

Pengalaman Akademik

- Workshop dan Diskusi “Program Berita yang Humanis dan Menginspirasi” Kampus 2 UAJY 11 September 2007
- Workshop “ Pemimpin Kebangsaan dan Menejemen Organisasi” Dema UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Balai Diklat Keuangan III Yogyakarta, 7-9 September 2007
- Seminar Nasional “Pengawasan Gender Mainstreaming dalam Mewujudkan keadilan dan Kesejahteraan di Masyarakat” BEM UCY 5 Januari 2008
- Pelatihan “Be A Healthy Person” Prodi Psikologi Gedung Training Center UIN Sunan Kalijaga 25 Desember 2008
- Pelatihan Jurnalistik Profetik Mahasiswa Gedung PAU Lt1 UIN Senan Kalijaga 30 November - 2 Desember 2008
- Talk Show PR “PR Role In Crisis Management” UPN Veteran Yogyakarta 14 Februari 2008.
- Seminar Nasional “Prospek Madrasah dan Kebijakan Pendidikan Nasional” Departemen Agama di UC UGM, Juli 2008
- Seminar “PR DAY” Prodi Ilmu Komunikasi UII Auditorium UII Cik Ditiro, 20 April 2008
- Seminar Nasional “Pelatihan Sensitifitas Kaum Beriman Terhadap Ketidak Adilan Gender dan

Demokrasi untuk Aktifis Organisasi Perempuan Keagamaan Se-Daerah Istimewa Yogyakarta” LSIP di Hotel Bifa 30mei-1 Juni 2008

- Seminar dan Video Conference “Being a Young Indonesian Muslim” Peace Tech Gedung Multy Purpose UIN Sunan Kalijaga 28 Agustus 2008
- Seminar International “It’s Time for Change” Arus Damai Di Gedung Multy Purpose UIN Sunan Kalijaga 11 Desember 2009
- Workshop “ Pembentukan Duta KPID” Komisi penyiaran Indonesia Daerah Yogyakarta 8 Agustus 2009
- Seminar Regional “ PR PRACTISED; Menjadi Handal dan Provesional”, BEM-ps Ilmu Komunikasi Fishum UIN Sunan Kalijaga, Di Gedung Promosi Doktoral 9 September 2009
- Pelatihan “Kreatif Menciptakan Iklan” Gedung Training Center UIN Sunan Kalijaga 10 Desember 2009
- Seminar “PR In Action with Wimar Witoelar” Gedung Training Center UIN Sunan Kalijaga 17 Februari 2009
- Diskusi Publik dan seminar Nasional “ Reinterpretasi Makna Perempuan dalam unia Politik; Study Akademis dan Ideologis” PMII Rafak Syari’ah UIN Sunan Kalijaga 20 Maret 2009
- Seminar Nasional “Challenging Public Relations Role in Marketing Communication” Ilmu Komunikasi UPN Veteran Yogyakarta, 8 mei 2010
- Tim Relawan dan Program Peduli Yogya-Ku (BAZNAS dan UIN Sunan Kalijaga) 20 Okt - 15 Nov 2010
- Pelatihan Motifasi Berprestasi Bagi Mahasiswa Aktifis, Rektrat UIN Sunan Kalijaga 6 Februari 2010
- Semiloka Marketing Communications BEM-Ps Ilmu Komunikasi Fishum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta , 18 Desember 2010.
- Redesign Kurikulum Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta 2012
- TANNASDA BPO DIY 2012
- Redesign Kurikulum Pekerjaan Sosial dan Teknologi Informatika Jurusan Interdisciplinary Islamic Studies

Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2013.

- Mendesign Kurikulum Ilmu Komunikasi Penyiaran Islam STAIQOM (Sekolah Tinggi Islam Qomaruddin) Gresik 2014
- Koordinator Program Melek Media & Literasi Media PW. IPPNU DIY Januari 2014
- Penanggung jawab Program Pendidikan politik Pemilih Pemula PW. IPPNU DIY Maret 2014
- Penanggung jawab Program Latihan kader Utama (LAKUT) PW. IPPNU DIY Agustus 2014

Hobby

Membaca, Mengaji, Berwirausaha, Berbisnis Online, Travelling, Memasak & Berorganisasi.

Motto Hidup

“BERFIKIR POLITIS, BERJIWA HUMANIS,
BERAKHLAQ ISLAMIS”

Referensi

1. **Bapak Risma Kusumanendra**, Executive Director Cristal Indonesia Manajemen Public Relations Consultant.
2. **Bapak Tazbir S.H, M.Hum**, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi DIY.
3. **Windiarta Nugraha, Direktur Utama**, Walasry Creative Media.
4. **Ibu Kusuma**, Victory International Futures
5. **Abdul Muiz Fansuri**, Direktur Utama CV. Mitra Mandiri Group

Terima Kasih...